

STRATEGI DI TENGAH PANDEMI, KOLABORASI ERAT INOVASI MENINGKAT

# MEDIA BPP

J E N D E L A I N O V A S I K E L I T B A N G A N

**MENUNAIKAN  
PERINTAH  
INOVASI  
DI DAERAH**



VOL 5 NO 2 MARET-APRIL 2020  
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID  
MAJALAH DWI BULANAN  
P-ISSN 2503 3352  
E-ISSN 2528 4181

# TO KNOW AND DO

## Protokol Kedatangan Sampai di Rumah Setelah Bepergian



1 Buka sepatu di pintu  
sebelum masuk rumah

Semprotkan disinfektan  
pada barang yang dibawa

2



3 Buang semua benda  
yang tidak dibutuhkan

Masuk rumah langsung  
cuci tangan dan kaki dengan sabun

4



5 Buka pakaian dan tempatkan  
pakaian kotor ke mesin cuci

Jangan menyentuh apapun

6



7 Jangan langsung beristirahat

Langsung mandi pakai sabun

8



LINDUNGI DIRI DARI  
**Coronavirus  
COVID-19**

Perjalanan inovasi daerah secara regulasi diawali dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus perintah daerah agar berinovasi tercantum dalam aturan tersebut. Regulasi ini merupakan angin segar yang mampu menumbuhkan instrumen lain dalam mendorong daerah berinovasi.

Di sisi lain, UU No 23 Tahun 2014 menjadi cikal bakal lahirnya Pusat Litbang Inovasi Daerah di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri). Melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah, BPP Kemendagri melancarkan agendanya untuk menyadarkan daerah, inovasi menjadi kebutuhan krusial. Sejumlah paket program disiapkan untuk mendorong inovasi tersebut. Seperti membangun sistem pengukuran indeks inovasi daerah, memberikan penghargaan kepada daerah yang berinovasi, mereplikasi layanan aplikasi inovasi, dan beberapa kebijakan lainnya.

Namun, tugas meningkatkan inovasi daerah bukan hanya diemban Kemendagri, melainkan agenda bersama yang melibatkan banyak pihak. Sejumlah kementerian, seperti Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN), Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta beberapa pihak lainnya memiliki peran tersebut. Mereka berjalan di rel tugas dan fungsinya masing-masing. Kendati demikian, sinergitas antarpihak dibutuhkan untuk mengakselerasi daerah berinovasi.

Terkait itu, pada edisi April 2020, *Media BPP* berupaya mengangkat wacana perihal upaya mewujudkan daerah berinovasi oleh BPP Kemendagri serta kerja sama yang berjalan atau dibutuhkan dengan kementerian/lembaga lain. Tak hanya itu, dalam rubrik Lebih Dekat ada sosok Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo Wahyu Utomo yang berbicara banyak soal dunia kepenulisan yang ia lakoni.

Beragam informasi menarik lainnya juga telah disajikan ke dalam aneka rubrik. Melalui berbagai narasi yang dihadirkan, merupakan komitmen *Media BPP* menjadi wahana diskusi kepada publik. Melalui ikhtiar ini, diharapkan BPP Kemendagri mampu hadir sebagai lentera pijar yang membawa cahaya kemajuan.

Selamat membaca.

Redaksi...

## MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN  
PENANGGUNG JAWAB AGUS FATONI

PEMIMPIN REDAKSI	HORAS MAURITS PANJAITAN
REDAKTUR PELAKSANA	AJI NUR CAHYO
REDAKTUR	KURNIASIH ACHMAD JANI RIVAI YUSUF HORAS MAURITS PANJAITAN MATHEOS TAN
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK	SAIDI RIFKY
ILUSTRASI COVER	TRES AUGUST
INFOGRAFIK	FAJAR HARAMUKTI



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI  
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT  
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

### Penundaan Pilkada Serentak 2020

Wabah virus corona atau Covid-19 telah menjalar ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sontak virus tersebut mengganggu beragam aktivitas masyarakat. Untuk memutus mata rantai penyebaran, aktivitas yang melibatkan banyak orang untuk sementara waktu dilarang. Lantas bagaimana dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini. Sejumlah informasi yang bergulir rencananya bakal ada penundaan.

-Pembaca-

### Jawab

Merespons adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 memang bakal ditunda dari jadwal semula 23 September 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sendiri telah menyetujui penundaan yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengusulkan tiga opsi jadwal penundaan Pilkada Serentak 2020; Pertama, Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kedua Pilkada diselenggarakan pada 1 April 2021. Ketiga, Pilkada digelar pada September 2021. Mendagri menyetujui usulan pertama, yaitu pelaksanaan Pilkada tahun ini akan digelar pada 9 Desember 2020. Dengan demikian, anggaran Pilkada 2020 tetap pada posisi semula dan tak ada realokasi. Disamping itu, tenggat waktu tanggap darurat Covid 19 yang ditentukan oleh Gugus Tugas Pusat Covid-19 adalah hingga tanggal 29 Mei 2020. Artinya, dengan harapan bahwa masalah pandemi ini akan selesai sesuai tenggat waktu tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan, hal ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

-Redaksi-

### Pelaporan Dana APBD untuk Pandemi

Pemerintah masih berjibaku melakukan percepatan penanganan Covid-19. Sudah semestinya percepatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga diikuti oleh pemerintah daerah. Daerah harus memiliki strategi jitu untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain aspek kesehatan, pemerintah daerah perlu memastikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak.

-Pembaca-

### Jawab

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, instruksi ini ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah agar melakukan refocusing, realokasi anggaran, untuk mendukung seluruh program-program kegiatan dalam penanganan Covid-19. Kemendagri terus memantau pemerintah daerah agar melaksanakan sejumlah poin dalam instruksi tersebut.

Adapun refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang dimaksud, diarahkan pada 3 (tiga) hal, yakni; Pertama, penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup; dan Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.

Berdasarkan data yang dihimpun per tanggal 12 April 2020 pukul 21.43 WIB, dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota di Indonesia, sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan yang diambil dari kegiatan, Hibah/Bansos, dan Belanja Tidak Terduga (BTT), ada yang hanya lewat kegiatan atau Bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya. Sedangkan 34 daerah lainnya belum melaporkan. Tapi prinsipnya, semua provinsi sudah menganggarkan untuk penanganan kesehatan. Kemendagri berharap, daerah yang belum menjalankan instruksi tersebut segera menunaikannya. Sebab hal ini dibutuhkan kerja bersama dan sinergi sebagai upaya melindungi masyarakat.

-Redaksi-

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email pid@litbangkemendagri.com atau melalui whatsapp di 085813258250

# MEDIA BPP

VOLUME 5 NO 2 | MARET-APRIL 2020

DAERAH **38**

### GENJOT PARIWISATA PASCA TSUNAMI SELAT SUNDA

Setahun pasca tsunami, aktivitas pariwisata di Banten masih terlihat lesu. Beberapa destinasi unggulan seperti Pantai Carita dan Tanjung Lesung sepi pengunjung. Untuk membangkitkan kembali pariwisata, pemerintah setempat terus berupaya menciptakan berbagai festival dan terus memperbaiki infrastruktur.

INFOGRAFIS **28**

JENDELA BPP **6-8**

AKTIVITAS **10**

SAINS DAN TEKNOLOGI **44**

GAYA HIDUP **45**

RESENSI BUKU **46**

RESENSI FILM **48**

SASTRA **50**

KOMIK **53**

OPINI BERSATU MELAWAN PANDEMI **54**

MAINSTREAMING PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI RPJMD **56**

CATATAN **58**

LAPORAN KHUSUS **26**

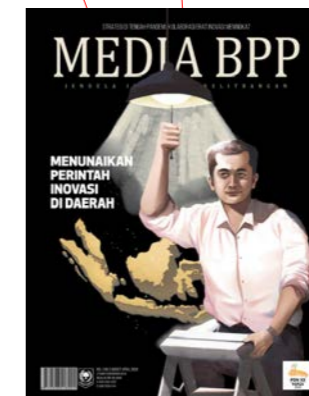
### ATUR STRATEGI DI TENGAH PANDEMI

Semenjak pandemi merebak di Indonesia, sejumlah kantor melengkapi fasilitasnya dengan beragam peralatan, tak terkecuali BPP Kemendagri.

LEBIH DEKAT **42**

### MENULIS SEBAGAI JALAN HIDUP

Menulis menjadi jalan hidup **Tri Widodo Wahyu Utomo (51)**. Kepiawaiannya membungkus persoalan lewat aksara, membawa lelaki kelahiran Yogyakarta ini, menjadi peneliti di Lembaga Administrasi Negara (LAN).



### LAPORAN UTAMA 12-27

## MENUNAIKAN PERINTAH INOVASI DI DAERAH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BPP KEMENDAGRI) TAK HANYA BERTUGAS MELAKUKAN KAJIAN IHWAL URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. BPP KEMENDAGRI JUGA DITUNTUT MAMPU MENINGKATKAN INOVASI DI DAERAH.



## Kawasan Ekonomi Khusus antara Harapan dan Kenyataan

**K**ebijakan ekonomi kawasan dalam sejarah perekonomian di Indonesia cukup beragam. Meskipun demikian, pembangunan dari kebijakan ekonomi kawasan di Indonesia masih bermasalah. Begitu juga dengan yang terjadi pada kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bisa disimpulkan dari 15 KEK yang ada di Indonesia saat ini belum ada satu pun yang dianggap membanggakan termasuk KEK pariwisata. Sampai saat ini, KEK Pariwisata masih terkendala infrastruktur, penyediaan lahan, serta belum didukung oleh skema insentif yang komprehensif. Akhirnya nilai investasi KEK jauh dari target dan belum berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Misalnya, sejak diresmikan pada 2014 lalu, KEK Tanjung Lesung belum terlihat kemajuan yang signifikan. Tingkat kunjungan wisatawan ke KEK Tanjung Lesung menunjukkan persentase penurunan. Begitu juga dengan KEK Mandalika, meski KEK Mandalika merupakan KEK pariwisata yang cukup progresif, namun juga tidak lepas dari permasalahan seperti pembebasan lahan.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah melakukan kajian aktual mengenai kedua KEK tersebut.

Menurut Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda Horas Maurits Panjaitan, penelitian tersebut diarahkan pada dua KEK yang telah beroperasi lebih dari dua tahun dengan jenis bisnis yang sama, yakni KEK Mandalika dan KEK Tanjung Lesung. KEK Mandalika ditetapkan pada 2015 dan telah masuk dalam tahapan peng-

operasian pada 2017, sedangkan KEK Tanjung Lesung telah ditetapkan pada 2012 dan masuk dalam tahapan pengoperasian pada 2015.

“Untuk itu, sangatlah perlu untuk melakukan telaah, kebijakan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan KEK. Demikian juga untuk ke depan, kebijakan apa saja yang bisa dioptimalkan untuk mendorong kemajuan KEK, termasuk sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan. Hal ini menjadi penting, karena Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu anggota Dewan KEK yang merupakan pembina dan pengawas umum kinerja pemerintah daerah di KEK,” ucap Maurits dalam acara Kelompok Diskusi Terfokus pada Maret lalu.

### Temuan penelitian

Menurut Peneliti BPP Kemendagri Ray Ferza kendala utama KEK Tanjung Lesung adalah aksesibilitas jalur masuk ke kawasan yang memakan waktu tempuh cukup jauh hingga 7 jam perjalanan. Padahal toleransi jalur pariwisata adalah 2 jam perjalanan. Di sisi lain, kawasan ekonomi seperti KEK pada umumnya menghadapi permasalahan yang sama seperti insentif fiskal. Pemerintah sering mengalami dilematis mengenai *potential loss* penerimaan negara dari sektor pajak bila memberikan pembebasan pabean maupun keringanan perpajakan.

“KEK Tanjung Lesung juga dihadapkan pada permasalahan lahan yang hingga saat ini belum sepenuhnya dikuasai. Menurut beberapa informasi dari 1.500 hektare lahan, baru 1.430 hektar bisa dikuasai. Sekira 70 hektar masih terkendala pembebasan lahan,” terang Ray.

Sama halnya dengan Tanjung Lesung, tata cara penggunaan fasilitas insentif daerah di KEK Mandalika juga belum



Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Horas Maurits Panjaitan (tengah) memimpin Diskusi Kelompok Terfokus mengenai KEK di Aula BPP Kemendagri

diatur secara rinci sehingga menjadi sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, akuisisi lahan untuk kepentingan ekonomi memang menjadi masalah utama hampir pada seluruh daerah di Indonesia. Kasus-kasus restriksi masyarakat lokal terhadap pembangunan penyelenggaraan KEK Mandalika, antara lain penolakan penggunaan lahan di Desa Kuta untuk pembangunan sirkuit Moto GP.

“Restriksi juga terjadi ketika penyelenggaraan KEK Mandalika membutuhkan jaringan transportasi bus dari dan menuju KEK Mandalika. Masalah lainnya adalah belum ada identifikasi khusus untuk menyelenggarakan perizinan KEK via *Open Single Submission (OSS)*, malah cenderung diperlakukan sama dengan perizinan diluar KEK,” ucapnya.

### Harus dilakukan daerah

Natasha Dini Chrisyanti (Tim Sekretariat Dewan Nasional KEK) menyatakan hal yang sama. Menurutnya banyak yang sudah dilakukan pemerintah pusat terkait dukungan kemudahan dan fasilitas bagi pelaku usaha di dalam

kawasan KEK. Tetapi tidak diimbangi oleh kebijakan di daerah.

Natasha berharap pemerintah daerah memberikan dukungan seperti perda insentif, perpajakan, dan retribusi. Selain itu ia menyarankan pemda agar membuat regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah penyangga. Hal ini untuk mengantisipasi pembangunan yang secara massif dilakukan masyarakat, serta untuk mengatasi *urban sprawl* di masa mendatang. Aturan mengenai RTRW di kawasan penyangga juga penting agar kawasan penyangga bisa tertata dengan baik dan juga sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kawasan kumuh. Pemerintah juga perlu mengatur limbah di kawasan penyangga agar tidak langsung dibuang ke laut, sehingga bisa mencemari dan menghilangkan daya tarik wisatawan.

Natasha berharap peningkatan intensitas koordinasi Dewan Kawasan yang berada di bawah provinsi, dengan Administrator KEK yang berada di bawah kabupaten perlu dilakukan. “Kami

menyayangkan Dewan Kawasan selama ini belum bisa membantu Dewan Nasional. Beberapa Dewan Kawasan tidak menginventarisasi isu-isu strategis yang ada di lapangan. Padahal ketika ada permasalahan di lapangan, sebenarnya banyak yang bisa di selesaikan di Dewan Kawasan. Kenyataannya, beberapa permasalahan di Administrator atau di daerah langsung mengadu ke Dewan Nasional.

Melengkapi pernyataan Natasha, Maxensius Tri Sambodo Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berpendapat, setidaknya ada tiga karakteristik penting yang membedakan KEK dengan kawasan ekonomi lainnya. Pertama, KEK harus diberikan keringanan dalam kebijakan tarif dan pajak. Dengan kebijakan tersebut, pengusaha tidak akan kesusahan ketika mengurus izin. Kemudian KEK harus didukung dengan infrastruktur yang superior atau akses yang eksklusif. Ketiga, perizinan yang sangat mudah dan prosedur administrasi yang sederhana. “Jika ketiga hal tersebut tidak ada, itu omong kosong,” kata Max.

### Rekomendasi penelitian

Penelitian mengenai KEK tersebut menyimpulkan beberapa hal di antaranya; Kementerian Dalam Negeri selaku Anggota Dewan Kawasan perlu duduk bersama 5 direktorat terkait KEK, untuk merumuskan peran minimal yang perlu dilakukan oleh Pemda dalam mendorong pembangunan KEK. Dengan demikian menurut Max, *positioning* Kemendagri akan semakin jelas dan tegas.

“Misalnya peran minimal pemerintah daerah. Kemendagri harus memberi solusi paling tidak, ada arahan terkait infrastruktur tata ruang, sumber daya manusia, perizinan, serta insentif,” terangnya.

Selanjutnya Kemendagri harus mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk merumuskan bentuk-bentuk insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih tepat untuk KEK Pariwisata, misalkan terkait dengan besaran modal usaha. Selanjutnya adalah mengusulkan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk membuat menu khusus OSS (Online Single Submission) bagi investor di KEK.

“Terakhir mungkin bisa dilakukan adalah meninjau kembali PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, khususnya dalam mendukung kelembagaan KEK yang profesional. Artinya kesepakatan bersama posisi Adminstratur KEK seperti daya tahan dari pengaruh politik, harus profesional dan tidak punya beban politik,” tutupnya.

Berbicara KEK pariwisata tidak akan pernah lepas dari identitas lokal di sebuah kawasan di mana KEK berdiri. Identitas lokal merupakan ciri khas yang harus dipertahankan. Jangan sampai, ketika kompetisi bisnis di KEK semakin kuat, karakteristik di suatu daerah dan kearifan lokal justru tidak dilindungi bahkan dilupakan. Peran pemerintah daerah menjadi penting agar kearifan lokal bisa berpadu dengan modernitas.

SAIDI RIFKY

## Puja Indah Tambah Layanan

**B**erdasarkan masukan dari pemerintah daerah, pada 2019 Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), mengembangkan sistem Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Pengembangan ini dilakukan dengan menambah layanan pada aplikasi, yang semula hanya 7 menjadi 13 layanan. Penambahan ini meliputi; layanan administrasi pemerintahan, layanan pekerjaan umum, layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibum linmas), layanan perhubungan uji kir, layanan sosial, serta layanan pariwisata.

Jenis layanan yang ditambahkan tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. *Pertama*, layanan administrasi pemerintahan, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi di daerah, baik internal organisasi perangkat daerah (OPD), antar-OPD, bahkan antar-pemerintahan daerah. Hubungan administrasi dengan pemerintah pusat juga dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis *online* ini. *Kedua*, layanan pekerjaan umum, dapat membantu masyarakat untuk melaporkan kerusakan beragam infrastruktur, seperti jalan dan jembatan kepada pihak penanggung jawab. Dengan aplikasi ini, pengelolaan alat berat sebagai aset daerah bisa terbantu.

*Ketiga*, layanan trantibum linmas, berfungsi memudahkan masyarakat saat menyampaikan keluhan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan. *Keempat*, layanan sosial, dapat membantu memberikan pelayanan sosial kepada Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sesuai kriteria masyarakat yang membutuhkan fasilitasi dan layanan pemerintahan. *Kelima*, layanan pariwisata, berguna memberikan informasi layanan pariwisata kepada publik, sebagai upaya mendongkrak pendapatan daerah. *Keenam*, layanan perhubungan uji kir, yang dapat membantu percepatan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari uji kir kendaraan. Tujuan utama aplikasi ini, yaitu menjamin keselamatan pengguna dan pemakai jalan



Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Jonggi Tambunan, mengatakan jumlah penambahan tersebut sebenarnya masih kurang, jika merujuk pada urusan wajib pemerintah daerah. Namun, pengadaan sistem layanan di Puja Indah merupakan upaya BPP Kemendagri, untuk memicu pemerintah daerah agar terdorong berinovasi. “Mereka bisa mendapat ide untuk melakukan pengembangan sesuai kondisi daerah, ini sebagai pemicu, merangsang daerah untuk melakukan inovasi,” ujarnya saat ditemui di ruangan-nya, Jumat (27/4).



Tidak hanya menambah layanan, sistem Puja Indah juga dikembangkan dari versi 1 menjadi versi 2. Pengembangan ini berdasarkan hasil evaluasi dan melihat kebutuhan BPP Kemendagri. Dengan perubahan ini, maka bakal ada pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru. Sampai saat ini upaya pemindahan tersebut masih dalam proses. Jonggi meyakinkan, secara sistem, Puja Indah versi terbaru sudah dapat digunakan oleh daerah. “Secara teknis sudah selesai, tinggal sosialisasinya ini,” katanya.

Sebenarnya Puslitbang Inovasi Daerah sudah menyusun jadwal agenda sosialisasi kepada pemerintah daerah. Semula sosialisasi diagendakan pada Maret-April 2020. Hanya saja, jadwal ini terbentur dengan merebaknya wabah pandemi yang diakibatkan virus corona atau Covid-19. Wabah tersebut membuat sejumlah agenda mandek. Kegiatan yang melibatkan banyak orang memang dihindari sebagai upaya memangkas penyebaran virus tersebut. Penundaan agenda sosialisasi berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dirinya berharap, wabah ini lekas berlalu agar sosialisasi ke pemerintah daerah dapat segera dilakukan. “Semoga segera membaik dan kegiatan yang sudah disusun dapat berjalan,” ujarnya

Sebagai informasi, Puja Indah dirancang untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan berbasis pada elektronik. Puja Indah merupakan program prioritas nasional, untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, khususnya daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah secara gratis, dengan sistem berbagi pakai (*multi tenant*).

Meski diberikan secara gratis, BPP Kemendagri tidak memaksa pemerintah daerah untuk mereplikasi semua layanan yang terangkum dalam Puja Indah. Jumlah layanan yang direplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. “Ada daerah yang memerlukan 2 atau 3 aplikasi, ada juga semuanya, bervariasi kebutuhannya,” kata Jonggi.

■ MUJAENI



JAKARTA- Di tengah wabah virus corona atau Covid-19, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), terus memastikan kajian evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap berjalan. Upaya ini dilakukan dengan membangun koordinasi melalui rapat *videoconference* bersama lembaga *think tank* independen, Selasa (7/4). Pertemuan tatap muka yang melibatkan banyak orang memang dikurangi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Rapat terbatas ini diikuti Plt. Kepala BPP Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, beserta jajarannya, dan lembaga *think tank* independen yaitu *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), serta Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES). Sehari sebelumnya, BPP Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan lembaga Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). Keempat lembaga tersebut, merupakan pihak yang dilibatkan dalam kajian evaluasi jalannya pilkada. Pelibatan kelompok dari luar institusi ini, merupakan ikhtiar Kemendagri menghasilkan kajian yang objektif dengan melihat berbagai sisi.

Mengawali pembicaraan, Fatoni mengaku, membutuhkan perkembangan informasi dari lembaga *think tank* yang terlibat, seperti dari segi substansi isu penelitian, kebutuhan anggaran, serta beberapa aspek lainnya. Terlebih kerja sama yang dibangun menggunakan skema swakelola tipe tiga yang belum banyak diterapkan oleh kementerian dan lembaga lainnya. Karenanya, lanjut Fatoni, BPP Kemendagri terus mempelajari ketentuan yang berlaku dalam sistem tersebut. “Kita akan terus belajar dan memperbaiki,” ujarnya.

Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte mengatakan, telah mengajukan sekaligus menyesuaikan proposal penelitian ihwal evaluasi jalannya pilkada. Dalam dokumen itu, CSIS membagi kajiannya dalam tiga klaster. Pertama, mengevaluasi masalah dalam penyelenggaraan pilkada. Pada fokus ini, kata Philips, akan dipandu dua pertanyaan, yakni perihal pengaruh mekanisme pencalonan internal partai politik dan perilaku kampanye kandidat terhadap pembiayaan politik. Pertanyaan selanjutnya, menyoal pengaruh perilaku kampanye dan profesionalitas penyelenggara pemilu terhadap meningkatnya potensi konflik dalam pilkada.

■ MUJAENI

## Pastikan Kajian Evaluasi Pilkada tetap Berjalan, BPP Kemendagri Gelar Rapat dengan Videoconference

Klaster kedua, yakni mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan indikator-indikator ekonomi politik. Klaster ini, kata Philips, mengevaluasi keterkaitan antara pilkada langsung dengan tata kelola pemerintahan dan dampaknya pada pembangunan serta kesejahteraan daerah. Sedangkan klaster ketiga, yakni mengevaluasi dinamika elektoral dan pilkada di Papua.

“Melalui studi klaster ini akan dievaluasi dampak langsung maupun tidak langsung dari dinamika sistem elektoral, baik di Papua maupun Papua Barat terhadap kondisi tata pemerintahan, pelayanan publik, kesejahteraan dan kohesi sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LP3ES, Fajar Nursahid, mengatakan pihaknya fokus mengkaji audit daftar pemilih untuk pilkada 2020. Audit ini, kata Fajar, akan menggambarkan daftar pemilih sementara (DPS) termasuk proses penetapannya. Kata Fajar, LP3ES pernah melakukan penelitian di Provinsi Maluku dan Provinsi Aceh, yang selalu muncul perbedaan daftar pemilih, baik dari jumlah maupun nama-nama yang tercantum. “Hal ini menjadikan kajian data pemilih ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana proses ini berjalan dalam konteks pilkada,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fajar, LP3ES juga ingin melihat pendapat masyarakat terkait pandangannya terhadap jalannya pilkada. Dalam menghimpun pendapat ini, sampel yang dipilih antara fokus audit dan persepsi masyarakat menggunakan responden yang sama. “Dengan begitu selain kita mendapatkan data terkait kualitas daftar pemilih, kita juga mendapatkan persepsi mereka terkait pilkada,” ujarnya.

Meski sudah menyusun agenda penelitian, Fajar menyadari hal itu kemungkinan berubah seiring adanya penundaan pilkada 2020. Dirinya meminta agar BPP Kemendagri memberikan pandangan terkait perubahan tersebut, terutama perihal jadwal tahapan DPS dan DPT. “Apakah dari segi tahapan DPS dan DPT itu masih akan berjalan di Bulan Juni dan Juli?” tanyanya. Jika masih berjalan, lanjutnya, jadwal penelitian yang telah disusun dapat dilakukan.

Menanggapi persoalan jadwal pilkada, Fatoni mengatakan, sesuai hasil rapat dengan Komisi II DPR RI, pilkada 2020 rencananya bakal ditunda. Namun, untuk waktu lamanya penundaan tersebut, masih menunggu terbitnya Perpu sebagai dasar hukum kebijakan. “Apakah nanti dengan ditunda akan memengaruhi kegiatan Bapak, atau bagaimana nanti kami sampaikan,” ujarnya.

Fatoni berharap, kegiatan kajian evaluasi jalannya pilkada dapat berlangsung baik. Ia mengingatkan kepada lembaga yang terlibat, agar mampu menjaga akuntabilitas. Terlebih, kegiatan ini merupakan program prioritas Kemendagri.

**JAKARTA-** Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menetapkan sepuluh zona integritas (ZI). Hal itu disampaikan, Pelaksana Tugas Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni saat menandatangani piagam ZI di lingkup BPP Kemendagri, Kamis (23/4/2020). Penandatanganan ini dihadiri oleh Sekretaris Badan, Kepala Pusat Litbang, dan penanggung jawab ZI.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen BPP Kemendagri, dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi, dan memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, upaya ini sebagai bagian dari langkah mewujudkan reformasi birokrasi.

Fatoni melanjutkan, sepuluh ZI tersebar di unit kerja BPP Kemendagri, baik pada Bagian Sekretariat Badan, maupun di Bidang masing-masing Pusat Litbang. Pada Bagian Sekretariat Badan, ZI ditempatkan di Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil (PJKSE).

Sementara enam zona lainnya tersebar di empat Pusat Litbang, di antaranya; 1). Bidang Otonomi Daerah, Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum. 2). Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Kependudukan, dan Pemerintahan Desa. 3). Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah. 4). Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Pusat Litbang Inovasi Daerah. 5). Bidang Sumber Daya Manusia, Pusat Litbang Inovasi Daerah. 6). Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pusat Litbang Inovasi Daerah.

Agus Fatoni berharap, unit kerja BPP Kemendagri dapat memberikan kinerja yang maksimal, sehingga dapat mewujudkan ZI secara menyeluruh. "BPP

## BPP KEMENDAGRI TETAPKAN 10 ZONA INTEGRITAS



Kemendagri akan berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya," ujarnya.

Untuk mempermudah terciptanya ZI, Mendagri sendiri telah menerbitkan keputusan No 061-318 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman dan tindakan, dalam membangun ZI.

Guna memacu tercapainya ZI yang berkualitas, setiap kementerian termasuk Kemendagri memiliki tim penilai internal (TPI). Sesuai namanya, TPI ini bertugas menilai satuan kerja dalam memperoleh predikat menuju WBK atau WBBM. Sementara itu, penilaian skala nasional dilakukan oleh tim penilai nasional (TPN) yang dibentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB).

Penilaian yang dilakukan meliputi dua aspek, yaitu komponen pengungkit

dan komponen hasil. Kedua komponen tersebut memiliki bobot skornya masing-masing. Adapun komponen pengungkit meliputi beberapa bidang, di antaranya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil, yakni berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pe-



layanan publik kepada masyarakat.

ZI memang berkait erat dengan terbangunnya ekosistem reformasi dalam tubuh birokrasi. Hal ini sebagai ikhtiar pemerintah melakukan pembenahan berupa pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai sandungan yang membuat sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal, harus ditata ulang atau diperbarui. Supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu ikhtiar BPP Kemendagri untuk meningkatkan reformasi birokrasi, adalah dengan menerapkan layanan berbasis elektronik. Sejumlah aplikasi telah dirancang untuk menunjang kinerja BPP Kemendagri. Beberapa di antaranya sudah berjalan baik, meski sejumlah layanan elektronik lainnya masih membutuhkan pembenahan dan pengembangan.

Salah satu layanan yang memanfaatkan sistem elektronik adalah penghitungan inovasi daerah oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah. Penghitungan ini dilakukan melalui sistem yang disebut indeks inovasi daerah. Secara garis besar kerja indeks ini diawali dengan unggahan data inovasi oleh pemerintah daerah. Data-data tersebut akan di-

hitung skornya melalui 35 indikator indeks inovasi daerah. Hasilnya berupa skor awal indeks inovasi bagi masing-masing daerah yang telah mengisinya.

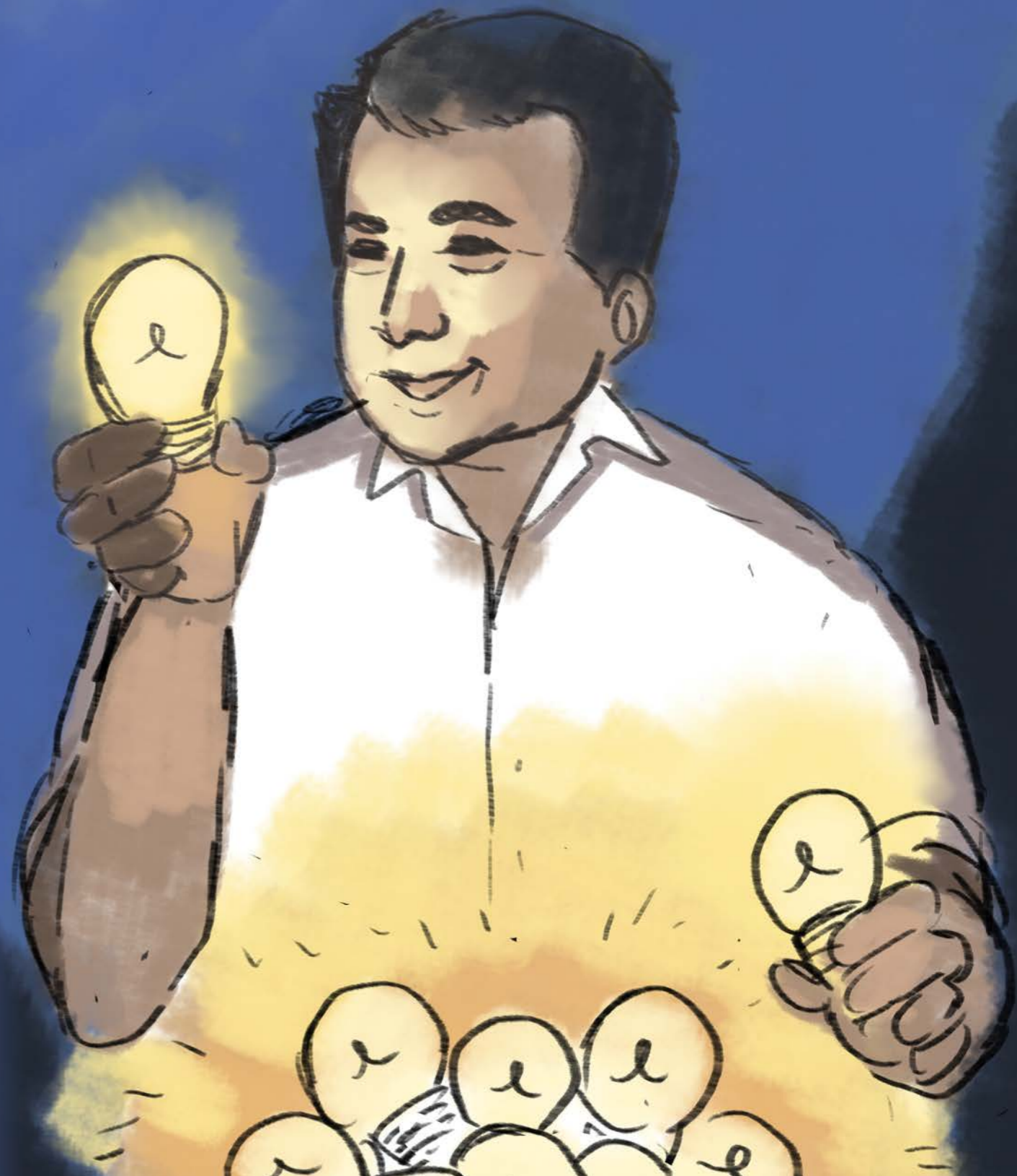
Melalui penilaian berbasis elektronik ini, diharapkan dapat menghasilkan skor yang objektif sesuai dengan data yang diunggah. Artinya campur tangan manusia dalam sistem tersebut berkurang, sehingga prasangka akan terjadinya kecurangan dapat terhindar. Sebab, penilaian ini berkaitan dengan penghargaan bagi daerah yang dianggap inovatif. Adapun penghargaan tersebut diberikan melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA) setiap tahunnya.

Kendati demikian, data yang telah diisi pemerintah daerah ke dalam sistem indeks inovasi tidak secara mentah diamini oleh BPP Kemendagri. Tetapi data tersebut bakal ditinjau kebenarannya di lapangan. Daerah yang mengunggah data yang keliru, bakal mendapat pengurangan nilai indeks inovasi daerah. Dalam penilaian di lapangan, tim penilai tidak dapat menambah skor yang dihasilkan melalui indeks inovasi. Mereka hanya berwenang mempertahankan nilai tersebut atau mengurangnya sesuai dengan temuan.

■ MUJAENI

# **MENUNAIKAN PERINTAH INOVASI DI DAERAH**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BPP KEMENDAGRI) TAK HANYA BERTUGAS MELAKUKAN KAJIAN IHWAL URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. BPP KEMENDAGRI JUGA DITUNTUT MAMPU MENINGKATKAN INOVASI DI DAERAH.



Perjalanan inovasi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum adanya regulasi ini, Indonesia dinilai belum memiliki aturan hukum yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi. Hal ini terlihat dengan tidak adanya perintah berinovasi di dalam regulasi. Oleh karena itu, UU No 23 Tahun 2014 menjadi babak baru bagi pertumbuhan inovasi daerah di Indonesia. Peraturan itu pula lah yang memungkinkan lahirnya Puslitbang Inovasi Daerah, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri).

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Widodo Wahyu Utomo, menuturkan sejak 2014, seperangkat peraturan yang memperkuat upaya daerah berinovasi terbit, misalnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 111 pada aturan tersebut, menyebutkan pembinaan penataan kelembagaan di daerah meliputi tiga parameter, salah satunya yaitu inovasi organisasi. Menurutnya, peraturan ini berperan besar terhadap merebaknya inovasi di daerah. “Ini yang kemudian membuat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) semakin termotivasi untuk berinovasi, karena sebagai pengukur efektivitas dan juga relevansi OPD itu mampu menghasilkan terobosan atau inovasi apa tidak,” ujar Tri Widodo, saat ditemui Media BPP, Rabu (18/3). Dengan demikian, lanjutnya, OPD yang tidak mampu berinovasi dapat dikatakan kehilangan relevansinya.

Kemudian terbit pula, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dengan terbitnya aturan ini, semakin menekankan pentingnya daerah berinovasi. Widodo mengatakan, pada Pasal 7 aturan itu misalnya, menyebutkan inovasi dapat



bersumber dari berbagai pihak, baik dari kepala daerah, anggota DPRD, OPD, aparat sipil negara, bahkan masyarakat. Pelibatan banyak pihak ini, memungkinkan tumbuhnya inovasi secara lebih baik.

“Ketika seluruh komponen ini mampu menunjukkan inisiatif berinovasi, maka inovasi daerah menjadi sebuah sistem, bukan inisiatif yang sifatnya parsial, yang hanya untuk memperbaiki bisnis proses di instansinya, tetapi ini menjadi sebuah gerakan bersama memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Tri Widodo menilai, sejauh ini dukungan inovasi dari berbagai pihak cukup berjalan baik. Dukungan itu datang dari kelompok masyarakat, seperti sekolah, *Non Governmental Organisation* (NGO), komunitas, dan sebagainya. “Sebenarnya penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya tanggung jawab dari OPD atau pemerintah daerah, tetapi juga dari seluruh komponen masyarakat. Maka

inovasi berbasis komunitas itu perlu didorong,” katanya.

Namun, tidak sedikit OPD yang masih menghasilkan inovasi hanya berdasarkan pada perencanaan dan analisis internal, tanpa melibatkan *stakeholder*. Padahal, lewat kerja sama dinilai mampu mendiagnosis kebutuhan inovasi di OPD secara tepat. “Oleh karena itu, perlu memikirkan strategi agar kelompok masyarakat bisa berkontribusi,” ujarnya.

Terkait pentingnya daerah melakukan inovasi juga disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni. Ia menyebutkan, inovasi daerah merupakan upaya untuk mencapai tujuan utama penerapan otonomi daerah, yak-



ni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sebab, pemerintah daerah memiliki keterbatasan, sehingga perlu didukung melalui penerapan inovasi. Inovasi, lanjutnya, menjadi kebutuhan, terlebih di era globalisasi seperti sekarang yang mengamini komunikasi antardaerah tak lagi terhalang oleh sekat-sekat batas wilayah. Beragam informasi dan layanan mestinya dapat diakses dengan mudah. “Oleh karenanya daerah dituntut memacu kinerjanya dengan melakukan inovasi,” ujar Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni.

Fatoni menambahkan, BPP Kemendagri dan Badan Litbang di daerah memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan, termasuk menumbuhkan inovasi. Fatoni menjelaskan, untuk mempercepat inovasi, dapat diawali dengan penyamaan persepsi tentang inovasi daerah. Penyamaan ini harus dipahami oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Dengan begitu, inovasi menjadi sebuah gerakan yang mampu dilakukan saban harinya. Sehingga tidak terjebak rutinitas kerja yang monoton dengan hasil kurang maksimal. Dengan penerapan tersebut, diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. “Kemendagri

sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintah daerah, dan Mendagri sebagai koordinator memegang peranan penting mendorong inovasi daerah,” ujarnya.

### Puslitbang Inovasi Daerah

Dalam upaya meningkatkan inovasi daerah, BPP Kemendagri menaikkannya melalui Puslitbang Inovasi Daerah. Urusan ini merupakan tugas baru yang diemban BPP Kemendagri, sejalan dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut, urusan inovasi daerah diatur dalam bab tersendiri, yang meliputi Pasal 386 sampai 390. Regulasi ini, menyebutkan pemerintah pusat berperan sebagai penilai atas inovasi yang telah dilakukan daerah. Penilaian dilakukan melalui unit kerja yang menjalankan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini peran itu dilakukan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri melalui BPP.

Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, menuturkan saat adanya perubahan terkait masuknya inovasi daerah dalam UU No 23 Tahun 2014, dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri. Saat itu ia mengusulkan, agar urusan inovasi daerah ditangani secara khusus

oleh salah satu Puslitbang BPP Kemendagri. “Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya pelaksana,” tutur Matheos saat ditemui di ruangannya, Kamis (12/3). Pada 2015, berdirilah pelaksana tersebut, yakni Puslitbang Inovasi Daerah.

Matheos menjelaskan, peran Puslitbang Inovasi Daerah bukan hanya melakukan kerja kelitbangan, melainkan mengevaluasi inovasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, baik melingkupi provinsi, kabupaten/kota. Inovasi tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk mendukung upaya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan Kemendagri.

Ia mengaku, tidak ada kendala berarti sewaktu membangun Puslitbang Inovasi Daerah. Terlebih saat itu, petinggi BPP Kemendagri turut mendukung dan memahami kebutuhan organisasi. Dukungan tersebut hadir pula dari sejumlah komponen terkait. “Bagi kami, terutama saya pribadi waktu mengurusinya itu, tidak ada kendala yang berarti,” tuturnya.

Senada dengan Matheos, peneliti BPP Kemendagri, Adi Suhendra, mengatakan penempatan Puslitbang Inovasi Daerah merupakan respons atas adanya perubahan komposisi komponen Kemendagri dan lahirnya UU No 23 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut, tutur Adi, telah memosisikan inovasi sebagai hasil dari penelitian dan pengembangan. “Ya tepat kalau komponen litbang yang melakukan fungsi ini,” terangnya.

### Upaya yang dilakukan

Dengan terbentuknya Puslitbang Inovasi Daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun peraturan turunan dari UU No 23 Tahun 2014, khususnya dalam ranah inovasi daerah. Proses itu mulai intens dilakukan BPP Kemendagri pada akhir 2016. Upaya ini membuahkan hasil ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Hal ini sebagai gebrakan awal yang



dilakukan BPP Kemendagri. Meski dalam penggarapannya regulasi tersebut melibatkan sejumlah pihak.

Tak hanya itu, BPP Kemendagri juga menginisiasi lahirnya Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Dengan aturan tersebut, BPP Kemendagri melalui Puslitbang Inovda, melakukan penilaian inovasi dengan membangun sistem indeks inovasi daerah. Pada prinsipnya, penilaian ini mengacu pada jumlah, kualitas, serta dampak inovasi yang dilakukan.

Adi menuturkan, indeks tersebut berisi 35 indikator pengukuran. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 14 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 21 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Secara mekanisme penggunaan, sistem ini diawali dengan pemberian *username* dan *password* dari Puslitbang Inovasi Daerah ke masing-masing pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah masuk ke sistem indeks inovasi daerah. Selama ini, respons pemerintah daerah dinilai cukup antusias terhadap pengisian indeks inovasi daerah. Meski dari jumlah total pemerintah daerah di Indonesia, masih separuh yang mengisi data indeks tersebut. Namun, Adi optimis tahun ini angka tersebut bakal terus naik, terlebih didukung adanya regulasi yang mengharuskan pengisian indeks inovasi daerah. Regulasi yang dimaksud Adi, misalnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 061-5449 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Daerah. “Salah satu indikator pemberian TPP tersebut yaitu adanya indeks inovasi daerah yang mereka capai,” ujarnya.

Di sisi lain, pengisian indeks merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai bentuk pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri. Puslitbang Inovasi daerah terus berupaya melakukan komunikasi dengan daerah yang belum perhatian terhadap pengisian tersebut.

Selain digunakan sebagai instrumen penilaian inovasi daerah, data indeks inovasi daerah juga mampu menggambarkan kondisi inovasi dimasing-masing daerah, dari yang kurang inovatif, inovatif, dan terinovatif. Data tersebut dapat memudahkan pembinaan yang dilakukan BPP Kemendagri, sebagai upaya meningkatkan daerah berinovasi.

Pembinaan tersebut dilakukan melalui sistem aplikasi layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Sistem ini dapat digunakan pemerintah secara gratis dan dapat berbagi pakai (*multi tenant*). Saat ini, Puja Indah memiliki 13 layanan, di antaranya: layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan ketenagakerjaan, layanan *update* kependudukan, layanan komoditi, layanan perizinan lokal, layanan aspirasi masyarakat, layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, layanan sosial, serta layanan pariwisata.

Setiap tahunnya Puslitbang Inovasi Daerah memiliki daerah *pilot project* pembinaan. Meski pembinaan juga dilakukan kepada daerah lain yang meminta untuk dilakukan replikasi layanan Puja Indah.

Guna memacu daerah berinovasi, BPP Kemendagri juga memberikan apresiasi melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA). Penghargaan didasarkan pada data yang diunggah pemerintah daerah ke sistem indeks inovasi daerah. Data tersebut kemudian dicek kebenarannya, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan antardaerah.



■ Kepala Puslitbang Inovasi Daerah Matheos Tan (ketiga dari kanan) dan Peneliti BPP Kemendagri Adi Suhendra (kedua dari kiri) bersama Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan saat sosialisasi Puja Indah di Musi Rawas beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Puslitbang Inovasi Daerah, Jerry Walo, perangkan ini berdasarkan tingkat pemerintahannya. Dalam merangking provinsi terinovasi misalnya, diurutkan dari lima daerah tertinggi. Sedangkan kabupaten/kota sebanyak 10 daerah, dan kategori daerah tertinggal/perbatasan sebanyak 3 daerah. Rangka tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan kepala daerah di

depan tim juri yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dari tahapan ini, tim penilai akan merumuskan siapa saja yang menempati daerah terinovasi dengan masing-masing kategori. “Nanti direkomendasikan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan siapa yang akan menjadi pemenang,” ujarnya.



Jeri melanjutkan, bagi daerah yang ber-

hasil memenangi IGA bakal diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID). Usulan itu diberikan dengan mencantumkan penilaian inovasi daerah yang dilakukan oleh Kemendagri melalui keputusan Mendagri. “Nanti biasanya ada surat dari Kementerian Keuangan, meminta hasil penilaian penghargaan,” tambahnya.

Jerry menjelaskan, pemberian DID sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017, dan Permendagri No 104 Tahun 2018. Secara singkat menyebutkan bahwa pemerintah yang berhasil

dalam kinerja terkait inovasi daerah nantinya bakal diberikan DID.

Tahun ini, tambahnya, penilaian IGA akan dimulai pada Mei mendatang dengan dibukanya sistem indeks inovasi daerah. Ia berharap, seluruh pemerintah daerah, baik provinsi kabupaten/kota dapat mempersiapkan data untuk diunggah ke dalam sistem. Beberapa wilayah memang masih belum mengisi sistem indeks inovasi daerah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BPP Kemendagri agar terus berikhtiar meningkatkannya.

■ MUJAENI

# Menebar Manfaat Data Inovasi Daerah

Dalam mengukur kondisi inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), membangun sistem indeks inovasi daerah. Kemampuannya menggambarkan kondisi daerah, perlu didorong pemanfaatannya lebih luas. Namun sebelum itu, pemerintah daerah perlu disiplinkan agar mengunggah inovasi di daerahnya ke dalam sistem.

**S**ISTEM INDEKS inovasi daerah yang dibangun BPP Kemendagri mampu melihat kondisi daerah di Indonesia, dari yang terinovatif sampai kurang inovatif. Indeks ini memiliki 35 indikator untuk menyebutkan daerah masuk dalam kategori yang mana. BPP Kemendagri tengah mengupayakan pemanfaatan data indeks tersebut dimanfaatkan secara luas oleh kementerian dan lembaga. Pemanfaatan itu misalnya dengan membina daerah-daerah yang masih tergolong belum inovatif.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Puslitbang Inovasi Daerah, Sukaca, menuturkan, data yang membentuk peta ini juga memudahkan upaya pembinaan kepada daerah sesuai dengan kondisi kekurangannya. Tidak keliru jika peta tersebut dinamakan peta pembinaan. “Dari 35 item itu, di sini yang bermasalah ini, kemudian rekomendasinya ini, kalau begitu pembinaannya ini,” ujar Sukaca.

Pembinaan yang dimaksud Sukaca,

meliputi bidang umum pemerintahan maupun teknis. Ihwal pembinaan umum pemerintahan akan dilakukan oleh Kemendagri, termasuk yang dikerjakan BPP. Sementara itu, untuk pembinaan di bidang teknis dapat dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait. Tahun ini, kata Sukaca, pembinaan secara teknis rencananya bakal digalakkan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dengan memanfaatkan peta pembinaan inovasi daerah. “Tahun ini akan kita galakkan pembinaan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lain, biar lebih bagus,” ujarnya.

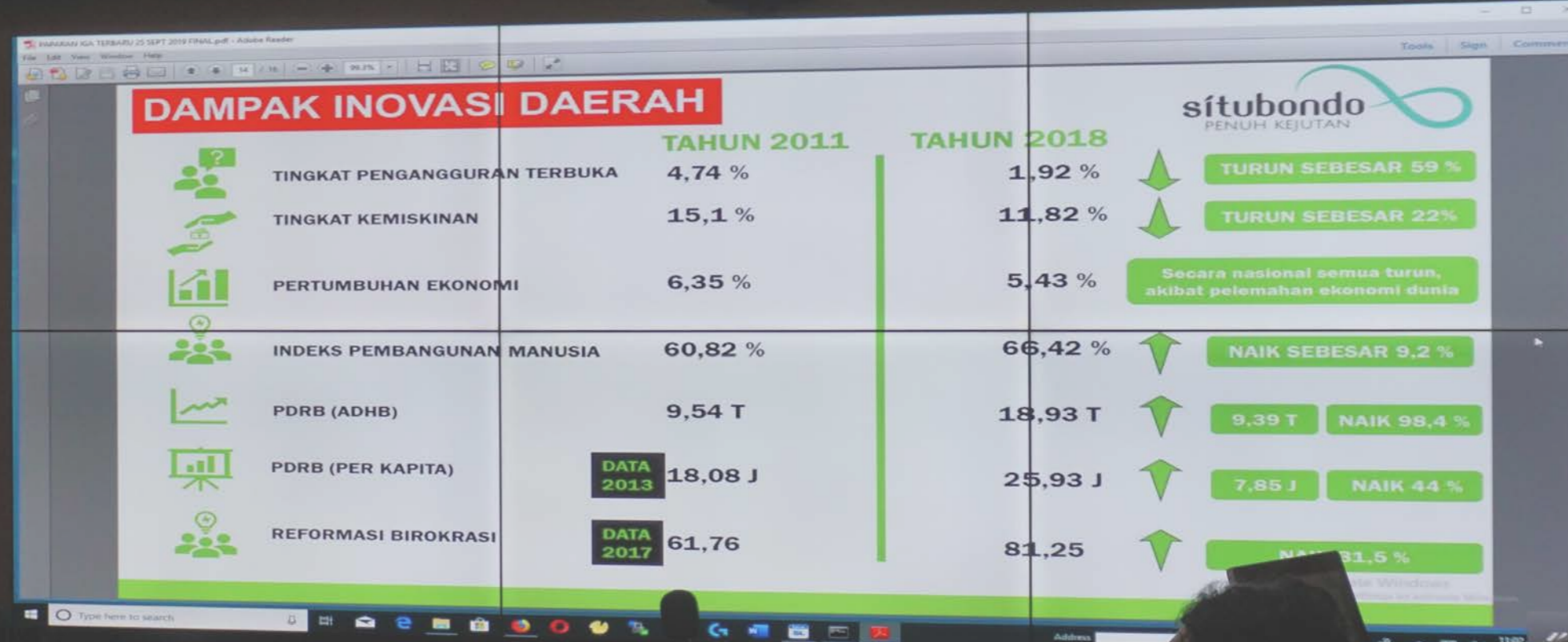
Sukaca menjelaskan, pada tahun sebelumnya, pembinaan daerah lebih fokus pada bidang pemerintahan umum. Karenanya, tahun ini baru akan digenjut pembinaan yang melibatkan kementerian dan lembaga lain. Pelibatan itu dilakukan secara bertahap dengan merujuk pada skala prioritas. Ia menuturkan, inovasi daerah sendiri meliputi bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya. “Lainnya ini dalam konteks pelayanan urusan yang menjadi kewenangan



daerah,” ujarnya.

Pelaksanaan urusan secara teknis, lanjutnya, memang menjadi peran kementerian dan lembaga terkait. Sukaca mencontohkan, bagaimana teknis pelaksanaan di bidang perhutanan, pertanian, dan semacamnya. Meski dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, pembinaan di bidang tersebut dapat memanfaatkan peta pembinaan yang disusun oleh BPP Kemendagri. “Kita punya data itu, makanya namanya peta yang berfungsi sebagai *guidence* (petunjuk),” tuturnya.

Sukaca mencontohkan, misalnya Kabupaten Kolon Progo memiliki kelebihan dan kekurangan dalam aspek apa



saja. Misalnya kawasan pantainya berpotensi ditanami sayur mayur. Dengan demikian, dapat dilakukan pembinaan di bidang tersebut. Daerah lain juga dapat mereplikasi inovasi yang dilakukan Kulon Progo.

Setiap tahunnya, Pusat Litbang Inovasi Daerah memiliki sejumlah daerah yang menjadi *pilot project* untuk mendapatkan pembinaan khusus. Pemilihan daerah ini tergantung tergantung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sukaca menuturkan, bakal mengarahkan hasil peta pembinaan sebagai bahan acuan pemilihan daerah *pilot project* yang mesti dibina. “Nanti kita sampaikan ke Bappenas, sehingga penentuan lokus *pi-*

*lot project* tadi berdasarkan pada data objektif yang ada (peta pembinaan),” ujarnya.

Tak hanya membina daerah yang menjadi *pilot project*, Puslitbang Inovasi Daerah, juga menargetkan sejumlah daerah lainnya dengan cakupan seluruh provinsi yang ada. Harapannya, dengan begitu, pemerintah provinsi akan melanjutkan pembinaan ke masing-masing kabupaten/kota. Hal ini penting, karena tidak semua daerah memahami inovasi. Sukaca berkata, saat mengunjungi salah satu daerah nyatanya pemahaman inovasi belum dikuasai. Walhasil, status daerah tersebut dalam indeks inovasi daerah belum terisi.

Data indeks inovasi daerah sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) sebagai salah satu data acuan pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD). Hal ini dibenarkan oleh Plt. Direktur Sistem Inovasi, Dirjen Penguatan Inovasi Kemeristek/BRIN, Paulina Pannen. Meski kendalanya beberapa daerah ada yang belum mengisi indeks inovasi daerah, sehingga menyulitkan pengukuran IDSD.

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengamini jika melalui data indeks inovasi daerah dapat meng-



gambarkan kondisi inovasi di sejumlah daerah. Namun, dalam menentukan lokus pembinaan, LAN sendiri mendasarkan pada hasil pembahasan dengan Bappenas. Penetapannya berdasarkan pada tingkat kemajuan suatu daerah. Ia menyebutkan, basis lokus pembinaan bukan hanya berdasarkan indeks inovasi daerah melainkan status daerah. “Apakah kabupaten itu masih masuk dalam kategori tertinggal belum. Dan kabupaten itu kita petakan, dan menjadi prioritas pendampingan untuk inovasi,” ujarnya. Dengan adanya pendampingan inovasi ini, lanjutnya, daerah tersebut diharapkan dapat lekas terentaskan dari kategori daerah tertinggal.

Ia menyebutkan, tahun ini LAN sudah mendapat masukan dari Bappenas terkait daerah yang mesti diprioritaskan. Daerah prioritas itu, di antaranya Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Barat.

Namun, dirinya tidak menolak jika nanti penetapan lokus pendampingan dilakukan bersama BPP Kemendagri. Widodo justru menilai hal ini akan lebih bagus. Artinya, daerah mana yang menjadi prioritas Kemendagri untuk diadvokasi, khususnya wilayah yang tertinggal secara inovasi, bukan dalam

hal pembangunan ekonomi. Sebab, antara inovasi dan ekonomi menurutnya memiliki pendekatan yang berbeda. Jika memungkinkan, peta pembinaan dari BPP Kemendagri diharapkan dapat menjadi pertimbangan LAN dalam menetapkan lokus pembinaan daerah di masa mendatang.

Menurut Tri Widodo, adanya acuan peta pembinaan yang berbeda karena berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal itu akan lebih baik jika peta tersebut dapat diintegrasikan.

Meski begitu, ada beberapa persoalan yang mesti dihadapi jika hendak menjadikan data indeks inovasi daerah menjadi acuan banyak pihak. Salah satunya terkait dengan kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengunggah data inovasinya ke dalam sistem.

Ia menyebutkan, ada daerah yang secara indeks inovasi daerahnya rendah, tetapi tidak tergolong ke dalam daerah tertinggal. Daerah ini bukan berarti belum melakukan inovasi, melainkan tidak mendokumentasikan dan melaporkannya dengan baik ke dalam sistem indeks. Akibatnya, meski memiliki inovasi, daerah tersebut tetap dinilai kurang inovatif. “Oleh karena itu mendorong perubahan dalam indeks itu, bukan hanya mendorong inovasinya, tetapi bagaimana mereka disiplin memperbarui setiap inovasi yang ada ke dalam sistem indeks inovasi da-



erah,” ujarnya.

Tri Widodo menambahkan, tidak sedikit daerah yang mengaku memiliki inovasi tetapi belum dilaporkan ke dalam sistem. Berbagai alasan diontarkan, seperti belum mendapat arahan dari pimpinan, padatnya kegiatan, ragu menilai apa yang dilakukannya inovasi atau bukan, dan beragam alasan lainnya. Hal ini disayangkan, karena mestinya inisiatif BPP Kemendagri dengan membangun sistem indeks, disambut baik oleh pemerintah daerah. “Oleh karena itu pendampingan ini menjadi penting,” ujarnya.

### Membangun ekosistem inovasi

Dalam menghadirkan situasi yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi, dinilai perlu membangun ekosistem yang baik di daerah. Menurut Tri Widodo pada umumnya daerah masih berpikir cara menghasilkan inovasi. Meski hal itu penting dalam menghadirkan inovasi yang melimpah.

Namun, perlu juga membangun ekosistem inovasinya agar tumbuh secara berkelanjutan.

Tri Widodo menyebutkan sejumlah komponen yang dapat mendukung lahirnya ekosistem inovasi, seperti menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Mustahil berharap inovasi tumbuh subur, tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, penyiapan SDM perlu dipikirkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus inovasi di daerah. Tim ini harus mendapat pembinaan yang cukup, sehingga dapat terus memperbarui pengetahuannya ihwal inovasi.

Komponen lainnya, adalah adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap inovasi, misalnya berupa penyiapan anggaran, termasuk menerapkan kebijakan sistem apresiasi dan sanksi. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan memberikan penghargaan kepada Organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai berinovasi. Sedangkan bagi

OPD yang belum menunjukkan perhatiannya terhadap inovasi dapat diberi peringatan.

Selain itu, perlunya dukungan dari komponen kelembagaan. Aspek ini berupa penunjukkan pihak yang diberi tanggung jawab utama dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi. Di beberapa daerah, penempatan tugas tersebut masih ditangani oleh unit yang berbeda-beda, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda), Badan Litbang Daerah, Biro Organisasi, dan unit lainnya. Kondisi ini, kata Tri Widodo, mengindikasikan penempatan tugas dan fungsi terkait inovasi masih belum terlalu jelas, sehingga perlu dicari penyelesaiannya.

Dalam membangun ekosistem yang mendukung inovasi, perlu juga menumbuhkan budaya berinovasi. Budaya ini, misalnya berupa menginstruksikan pegawai agar menyampaikan ide-ide inovasinya kepada pimpinannya. Dapat pula, me-

ngondisikan antar-unit saling berbagi pengetahuan. “Hal itu akan memacu ekosistem inovasi, sehingga dengan sendirinya inovasi akan tumbuh tanpa harus disuruh-suruh,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan, ekosistem itu penting sebagai basis lahirnya inovasi. Ia menyamakan, membangun ekosistem serupa dengan proses pertanian. Menurutnya, pertanian tidak hanya membutuhkan aktivitas menanam, tetapi perlu pula memikirkan kesuburan tanah, ketersediaan air, pihak yang merawatnya, serta iklimnya. Jika aspek tersebut disediakan dengan baik, maka apa yang ditanam bakal tumbuh subur. Saat ini, kata Tri Widodo, tidak sedikit orang yang menanam inovasi, tetapi mengeluhkan beragam persoalan, mulai dari anggaran, SDM, dan sebagainya. “Saya kira itu yang perlu kita lakukan secara simultan mendorong inovasi sekaligus menyiapkan ekosistemnya lebih sehat,” ujarnya.

Dalam mendorong inovasi di daerah, LAN sendiri telah menerapkan sejumlah kebijakan. Widodo menuturkan, sesuai dengan tugas pokok LAN, ada beberapa usaha kebijakan yang dilakukan. Pertama, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Dari sistem ini, LAN mampu mendorong akselerasi perubahan melalui apa yang dikenal sebagai proyek perubahan. Proyek ini merupakan gagasan pembaruan yang diinisiasi oleh peserta diklat, sebagai pembaru di unitnya masing-masing. Peserta tidak hanya membuat pembaruan dalam konteks individu, tetapi mengajak ekosistem di sekitarnya. “Itu harus diajak mendorong di dalam kerangka proyek tersebut,” katanya.

Ikhtiar yang kedua melalui program yang disebut laboratorium inovasi. Kegiatan ini merupakan program pendampingan untuk bisa memikirkan sejak awal, tentang kebutuhan apa saja yang harus dipetakan oleh sebuah organisasi terutama di daerah. Tak hanya di situ, laboratorium ini juga merancang kebutuhan tersebut menjadi program yang bisa diimplementasikan.

■ MUJAJENI

# KOLABORASI ERAT INOVASI MENINGKAT

Upaya peningkatan inovasi di daerah, tak hanya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri). Sejumlah kementerian dan lembaga lainnya turut andil dalam misi tersebut. Kolaborasi dibutuhkan untuk melejitkan lajunya.

**P**ENINGKATAN inovasi di daerah merupakan misi yang melibatkan semua pihak. Sejumlah kementerian/lembaga memiliki program untuk turut andil dalam tugas tersebut. Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), terus berupaya meningkatkan daerah berinovasi. Sejumlah program disiapkan untuk mendorong inovasi di daerah. Program ini seperti pengukuran indeks inovasi daerah, pemberian penghargaan, replikasi layanan inovasi, dan beberapa kebijakan lainnya. Meski Kemendagri memiliki beragam program, beberapa kementerian dan lembaga yang ikut berperan terhadap inovasi daerah, mengharapkan adanya rumusan kolaborasi untuk meningkatkan daerah berinovasi.

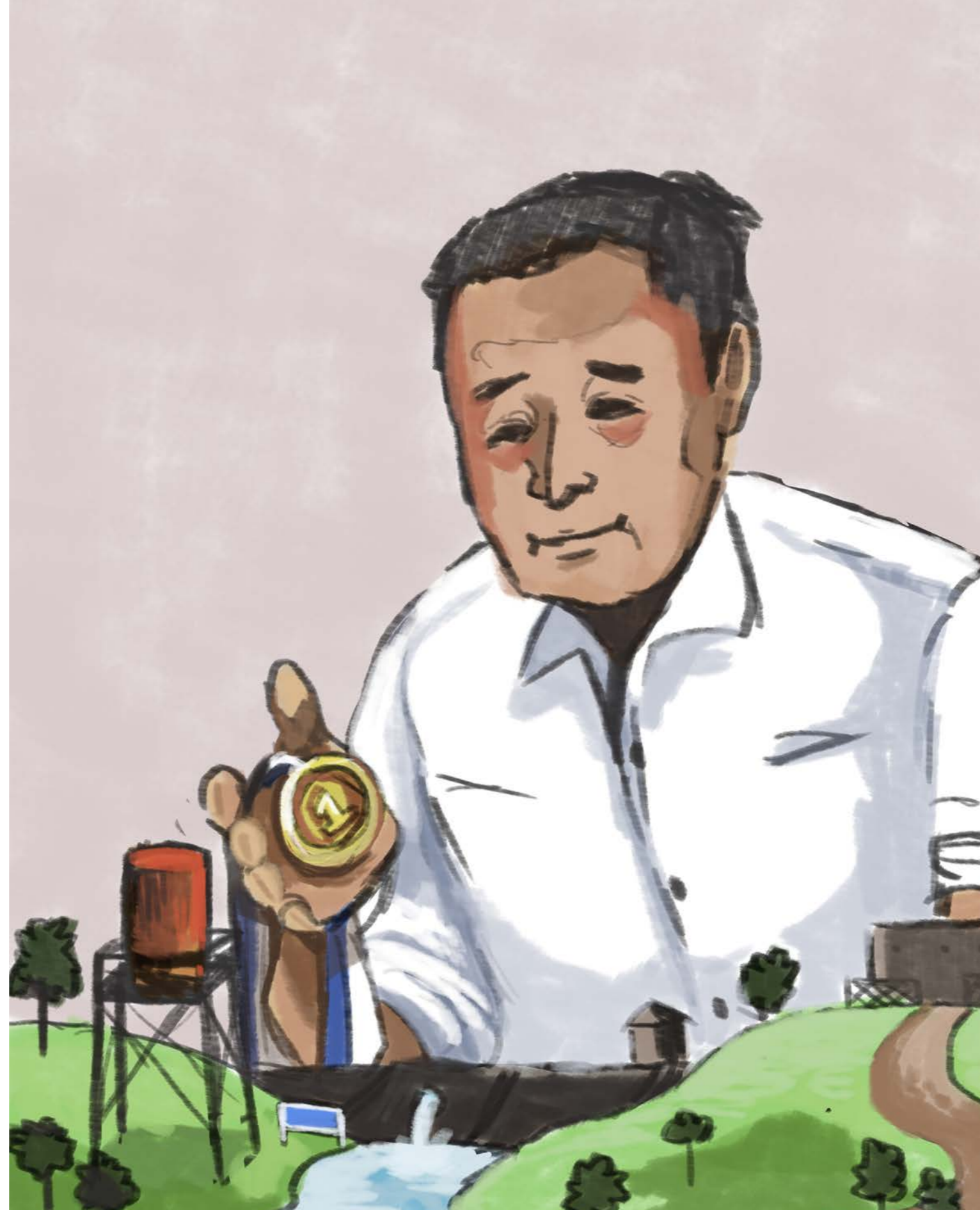
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menyadari, tidak ada satu lembaga yang mampu bekerja sendiri. Terlebih tugas antar-kementerian saling terkait, sehingga kerja sama maupun koordinasi dibutuhkan. Kerja sama itu misalnya dalam penilaian yang dilakukan masing-masing kementerian dan lembaga. Karenanya, kolaborasi dalam penilaian perlu dipadukan, dan memastikan konsen bidang urusan yang ditangani tak

tumpang tindih. “Sehingga semuanya berada pada jalurnya masing-masing,” ujarnya.

Seperti diketahui, BPP Kemendagri bukan satu-satunya pihak yang memberikan penilaian dan penghargaan terhadap daerah yang berinovasi. Sejumlah kementerian/lembaga melakukan hal serupa sesuai tugasnya masing-masing. Seperti misalnya Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) yang menggelar peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas). Salah satu kegiatannya yaitu memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi berupa Anugerah Budhipura. Sedangkan untuk kabupaten/kota berbentuk Anugerah Budhipura.

Selain itu, ada pula penghargaan yang diadakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memberikan apresiasi kepada daerah lewat ajang Inovasi Administrasi Negara (Inagara). Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Refomasi Birokrasi (Kempan-RB) juga memberikan penghargaan melalui gelaran Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).

Sementara itu, Kemendagri sendiri, melalui BPP sejak 2017 getol memberikan penghargaan kepada daerah



yang dinilai berinovasi. Penghargaan ini diwujudkan dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA). Dalam penilaiannya, BPP Kemendagri membangun sistem indeks inovasi daerah yang bakal menghitung skor sesuai dengan data yang diunggah pemerintah daerah. Dengan berbasis sistem, kata Fatoni, skor awal dari penilaian itu akan lebih objektif. Untuk memastikan kebenaran data yang diunggah, selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan. Selanjutnya, kepala daerah perlu memaparkan inovasi di depan tim juri yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait.

Di samping pemberian penghargaan, beragam pembinaan juga diberikan kepada daerah untuk mendukung tumbuhnya inovasi. BPP Kemendagri misalnya, memberikan pembinaan melalui program Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Program ini berisi beragam aplikasi layanan yang dapat direplikasi oleh daerah.

Meski begitu, peningkatan inovasi bukan tanpa kendala, Fatoni menyebutkan, sejumlah sandungan yang perlu dibenahi. Seperti perlunya menyamakan persepsi antarpihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Persoalan lainnya, masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki daerah. Perubahan cara berpikir ihwal inovasi juga perlu ditanam, termasuk memberikan stimulan kepada pegawai agar giat berinovasi. “Sehingga inovasi yang dilakukan individu menjadi inovasi satu lembaga atau OPD (organisasi perangkat daerah). Kemudian inovasi OPD menjadi inovasi pemerintah daerah, dan seterusnya,” ujarnya. Selain itu, infrastruktur pendukung lainnya juga perlu diperhatikan.

Fatoni menyadari sejumlah daerah memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur. Karenanya, inovasi menurutnya tidak selalu mahal dan menggunakan teknologi yang canggih. Inovasi dapat dilakukan dari hal terkecil, seperti melakukan sesuatu yang sederhana dengan cara luarbiasa.

Dalam melakukan penilaian di daerah tertinggal, BPP Kemendagri menerapkan standar pengukuran yang berbeda. Dalam ajang IGA, BPP Kemendagri menyediakan kategori khusus. Hal ini untuk menyesuaikan kondisi daerah tertinggal, yang berbeda dengan wilayah lainnya. Karenanya, Fatoni menekankan, dengan kondisi daerah seperti apapun, inovasi tetap harus dilakukan.

### Kerja sama cukup baik

Terkait dengan kerja sama antar-kementerian dan lembaga, selama ini dinilai sudah berjalan baik. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo. Dia mengaku, LAN kerap dilibatkan dalam penilaian IGA yang digelar Kemendagri, melalui BPP. Hal serupa juga dilakukan LAN, yang sering mengundang pihak Kemendagri jika menggelar kegiatan. Jauh sebelum penilaian IGA, LAN juga dilibatkan saat menyusun instrumen indeks inovasi daerah. “Jadi selama ini kerja samanya cukup sinergis, kami banyak melakukan upaya di belakang, sementara teman-teman Kemendagri lebih tampil di depan karena mereka memiliki otoritas secara kebijakan,” ujarnya saat ditemui, Rabu (18/4).

Setiap tahun, lanjutnya, BPP Kemendagri mengeluarkan indeks inovasi daerah. Upaya itu menurutnya mampu memotivasi daerah untuk melakukan perbaikan. Daerah yang skornya masih di tataran menengah bawah, dapat terpacu agar di tahun berikutnya lebih baik. Pada saat bersamaan, LAN juga menyiapkan diri untuk mendampingi pemerintah daerah. Dengan langkah ini, dia berharap, pendampingan tersebut mampu mewujudkan harapan Kemendagri ihwal daerah berinovasi.

Namun, agar hasilnya lebih maksimal, Widodo mengusulkan agar proses inkubasi inovasi di daerah dapat dilakukan secara bersama-sama. Dirinya mengaku, beberapa kali sudah menyampaikan ide tersebut ke pet-



inggi BPP dan berharap dapat lekas diwujudkan. Beberapa waktu lalu, LAN menggelar kegiatan yang dihadiri oleh Kemendagri. Dalam forum ini, muncul gagasan yang memungkinkan adanya kerja sama melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap SDM di daerah. Upaya ini agar SDM di daerah memiliki kompetensi yang andal untuk mendorong inovasi.

Menurutnya, langkah ini dapat mendukung program pamong inovasi daerah yang diinisiasi BPP Kemendagri. Program bimtek bagi para pamong perlu didesain lebih sistematis dan

terstruktur, sehingga keberadaannya bukan sekadar program, tetapi mampu memberikan perubahan di daerah.

Meski bimtek sudah berjalan dan beberapa kali menghadirkan LAN sebagai pemateri, tetapi hal ini belum cukup. Kerja sama lainnya dapat dibangun dalam menyusun sistem pembinaan secara utuh. Maksudnya yaitu menyiapkan panduan dan pedoman kebijakan secara lengkap, sampai dengan pembagian tugas pendampingan di daerah. “Karena inovasi bukan hanya tanggung jawab Kemendagri, tetapi semua pihak,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kegiatan inovasi, lanjutnya, perlu adanya pedoman pengelolaan kegiatan bagi para pamong di daerah. Dengan demikian, program peningkatan kualitasnya tidak hanya bergantung pada anggaran BPP Kemendagri atau LAN, tetapi dapat dianggarkan sendiri oleh daerah. Menurutnya, jika kegiatan itu bergantung pada pemerintah pusat, maka akselerasi peningkatan kompetensi para pamong bakal lambat. Kondisi ini berbeda jika inisiatifnya muncul dari daerah. “Dalam hal ini, BPP dengan LAN dapat mendesain semacam kuri-

kulum untuk para pamong inovasi di daerah,” katanya.

Secara garis besar skema itu misalnya menempatkan peran BPP Kemendagri sebagai *leading sector*. Sedangkan LAN berperan sebagai pendukung dari penyediaan kurikulum, bahan ajar, dan metodenya.

### Perlu ditingkatkan

Meski kerja sama antar-kementerian dan lembaga sudah berjalan baik, akan tetapi hal ini masih perlu ditingkatkan. Widodo menyebutkan, misalnya dalam hal penganggaran, yang masih

bergantung pada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jika semangat berinovasi gagal mendapat dukungan dari sisi program, perencanaan, dan anggaran, maka menjadi tidak optimal. Karenanya mensinergikan program inovasi dengan program perencanaan, pembangunan, maupun penganggaran menjadi keharusan.

Belum lagi dengan kementerian teknis yang masing-masing memiliki Badan Litbang. Ia mengatakan, Badan Litbang tersebut mestinya tak hanya mengurus urusan litbang tetapi juga inovasi. Dirinya memerhatikan, selama ini badan litbang lebih banyak menghasilkan laporan penelitian. Sedangkan dari sisi prototipe inovasinya belum mendapat porsi yang seimbang. “Sekali lagi kalau berbicara inovasi, harus menjadi kepedulian semua pihak,” ujarnya.

Ihwal kerja sama, tahun ini LAN berencana melakukan kolaborasi anggaran dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk menemukan inovasi. Skema kolaborasi ini secara garis besar anggarannya bersumber dari LAN, sedangkan Dirjen Dukcapil berperan sebagai *endorse* agar inovasi dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Widodo menuturkan, program inovasi yang dilakukan LAN berbasis sektor. Tahun ini, katanya, konsen itu mengarah pada sektor kependudukan dan catatan sipil. “Bagaimana kita mencari inovasi baru, di tengah inovasi yang banyak, tetapi kita mendorong inovasi secara masif,” ujarnya. Widodo menambahkan, LAN terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak termasuk BPP Kemendagri.

Pentingnya membangun kerja sama dalam meningkatkan inovasi daerah, juga disampaikan Plt. Direktur Sistem Inovasi, Dirjen Penguatan Inovasi Kemristek/BRIN, Paulina Pannen. Kerja sama itu misalnya dengan Kemendagri. Dia mengajak Kemendagri agar berkenan memberikan insentif kepada daerah yang mendapat penghargaan dari Kemenristek/BRIN, seperti Anugerah

Budhipura untuk pemerintah provinsi, dan Anugerah Bughipraja untuk pemerintah kabupaten/kota. Pemberian insentif ini, sebagai upaya mendukung daerah agar lebih terpacu meningkatkan inovasi dan daya saingnya.

Paulina mengaku, upaya membangun kerja sama dalam pemberian insentif ini pernah dilakukan Kemenristek/BRIN, yang saat itu nomenklaturkannya masih Kemenristek dan pendidikan tinggi. Langkah itu melalui berkiriman surat yang ditandatangani Menristekdikti yang ditujukan kepada Mendagri pada akhir 2019. Namun sejauh yang ia tahu, perkembangan dari surat tersebut belum terlihat. Ia menduga, hal ini karena adanya perubahan komposisi jajaran kabinet periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam jajaran kabinet terbaru, beberapa posisi pimpinan di kementerian memang berubah, termasuk di Kemenristek/BRIN dan Kemendagri. Untuk membangun kembali komunikasi dengan Kemendagri seperti BPP, Paulina masih menunggu struktur Kemenristek/BRIN yang masih dalam proses penyusunan.

**“  
JADI PUNYA  
INOVASINYA DULU,  
BARU INOVASI  
ITU MEMILIKI  
NILAI UNTUK  
DIHILIRISASI,  
ITULAH NAMANYA  
INDEKS DAYA  
SAING**

Ia menjelaskan, pemberian penghargaan kepada daerah berdasarkan penghitungan indeks daya saing daerah (IDSD) yang dibangun Kemenristek/BRIN. Indeks daya saing daerah, mengadaptasi sistem indeks daya saing internasional yaitu *global innovation index* dan *global competitiveness index* dari *World Economic Forum*. Perangkat pengukurannya, kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Dalam pengembangan sistem dan indikatornya, Kemenristek/BRIN juga melibatkan litbang daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan BPP Kemendagri. Masing-masing pemerintah daerah diharapkan dapat mengisi data yang sesuai ke sistem IDSD. Hasil unggahan ini, dapat dilihat secara umum dan menggambarkan tingkat daya saing masing-masing daerah. “Silakan Balitbang yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota minta akun ke kita untuk mengisi,” tutur Paulina.

Perhitungan sistem IDSD salah satunya merujuk pada data indeks inovasi daerah. Beberapa data tersebut sudah terhubung dengan sistem IDSD untuk dihitung secara menyeluruh dengan data lainnya. Artinya, untuk memiliki daya saing tinggi, daerah tersebut mesti memiliki inovasi. “Jadi punya inovasinya dulu, baru inovasi itu memiliki nilai untuk dihilirisasi, itulah namanya indeks daya saing,” katanya.

Selain membangun IDSD, Kemenristek/BRIN juga memunyai program klaster inovasi daerah. Sejak 2015, ujar Paulina, Kemenristek/BRIN telah menampung 28 klaster produk unggulan daerah (PUD) dari berbagai bidang, baik industri, pertanian, dan sebagainya. Jika ada daerah yang memiliki produk unggulan, dirinya mempersilakan untuk mengikuti program tersebut. Pembiayaannya akan ditanggung Kemenristek/BRIN, dengan catatan proposal yang diajukan menjelaskan produk tersebut akan dikembangkan dan dihilirisasi ke tiga pelak-



Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah saat meresmikan Galeri Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik 2019 di Banyuwangi

sana, yaitu pemerintah daerah, industri, dan akademisi di daerah setempat. Paulina berharap, Kemendagri mampu meningkatkan peran litbang daerah dalam mengembangkan PUD. “Nanti produk unggulan daerahnya bisa dikembangkan melalui klaster inovasi daerah,” katanya.



### Penempatan Balitbang daerah

Dalam menjalankan programnya, Paulina sering berkomunikasi dengan Balitbang daerah. Namun, Paulina mengaku bingung dengan penempatan urusan Litbang di daerah. Ada beberapa daerah yang menempatkan penanganan urusan tersebut berupa OPD tersendiri. Namun, tidak sedikit daerah yang menggabungkan urusan litbang dengan OPD lainnya, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “*Kan* kita bingung kalau di bawah Bappeda artinya dia tidak mandiri untuk melakukan riset, cuma menerima penelitian dan pengembangan yang diminta Bappedanya,” ujarnya. Padahal, Kemenristek/BRIN menginginkan litbang di daerah mampu mengidentifikasi PUD dan bisa melaporkannya.

Di sisi lain, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang belum mengisi indeks inovasi daerah. Ada pula daerah yang

sudah mengisi, tetapi belum sesuai ketentuan. Padahal, data ini penting sebagai bagian dari dari penghitungan IDSD. Tak jarang, saat mendapati daerah yang belum mengisi data tersebut, pihaknya meminta agar daerah segera memasukkannya. Namun, hal itu hanya berupa imbauan karena litbang daerah bukan di bawah wewenangnya, melainkan Kemendagri. Karenanya, Kemendagri diharapkan dapat melakukan supervisi ke daerah terkait pengisian tersebut. “Kita kadang-kadang susah mendapatkannya, karena data di daerah itu belum ada,” ujarnya.

Dengan berbagai persoalan itu, dirinya mengharapkan, agar Kemendagri dan Kemenristek/BRIN dapat duduk bersama untuk mencari solusi. Bisa saja penilaian IGA dan IDSD digabungkan untuk memutuskan daerah yang berhak mendapatkan dana insentif. “Kita bareng-bareng, dari pihak kami ada

pembimbingan dan pengembangannya, dari pihak Kemendagri ada insentifnya,” tuturnya.

Meski kerja sama belum terbangun, Kemenristek/BRIN tetap membantu litbang daerah, seperti pemberian dana hibah melalui pengembangan klaster inovasi daerah. Namun, Paulina berharap, Mendagri dapat lebih terbuka dan menangkap peluang kerja sama.

Terkait masih adanya sejumlah daerah yang belum mengisi indeks inovasi daerah, BPP Kemendagri terus melakukan sosialisasi. Fatoni menuturkan, dalam berbagai kesempatan, BPP Kemendagri terus menyampaikan pentingnya pengisian data tersebut. Sebab, penilaian serta pembinaan yang dilakukan berangkat dari data indeks inovasi daerah. Dalam penilaiannya, sistem indeks inovasi daerah dilakukan secara elektronik dan akan melahirkan skor penilaian awal daerah berinovasi. Data itu kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kebenarannya di lapangan. “Sehingga diharapkan ada objektif penilaian awal terkait inovasi daerah,” katanya.

Fatoni mengamini, beberapa Litbang daerah strukturnya bergabung dengan OPD lain, seperti Bappeda. Pasalnya, sebagian pihak masih menganggap, lembaga ini tidak terlalu penting. Karenanya, sangat perlu meningkatkan kinerja dan motivasi, sehingga badan litbang dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, yakni sebagai lembaga *think tank*. Di sisi lain, daerah yang badan litbangnya berdiri sendiri memiliki nilai lebih dalam penghitungan skor indeks inovasi daerah.

Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, menambahkan, pengisian indeks merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pelaporan kepada Mendagri. Mengingat tidak sedikit daerah yang belum mengisi indeks, dirinya bakal memanggil daerah terkait.

# BENTUK INOVASI DAERAH



## INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: E-Planning, E-Budgeting, dan lain sebagainya.

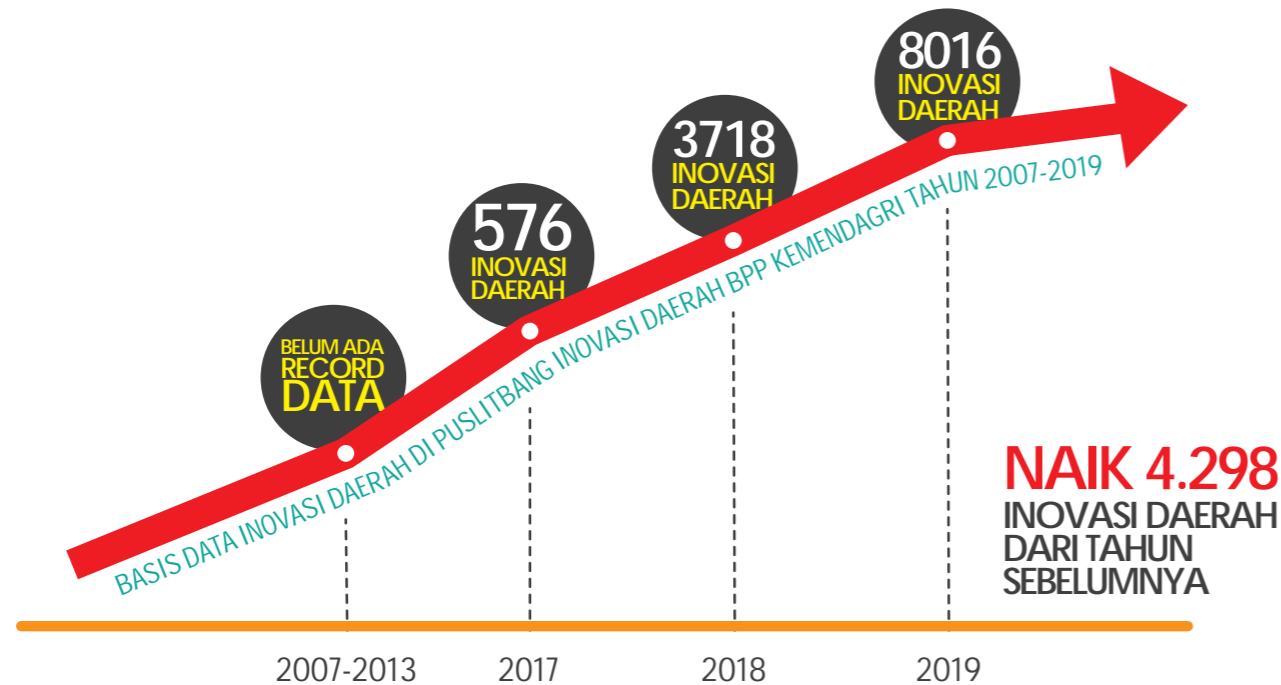
merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang langsung diberikan kepada masyarakat seperti: inovasi pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lainnya.

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK

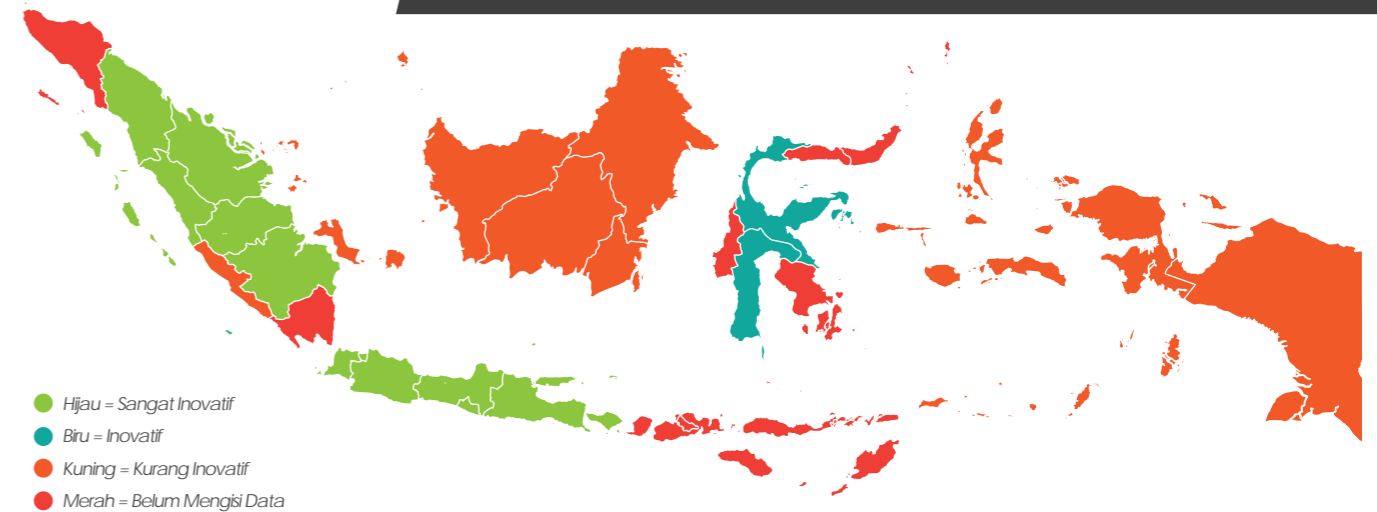


## INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

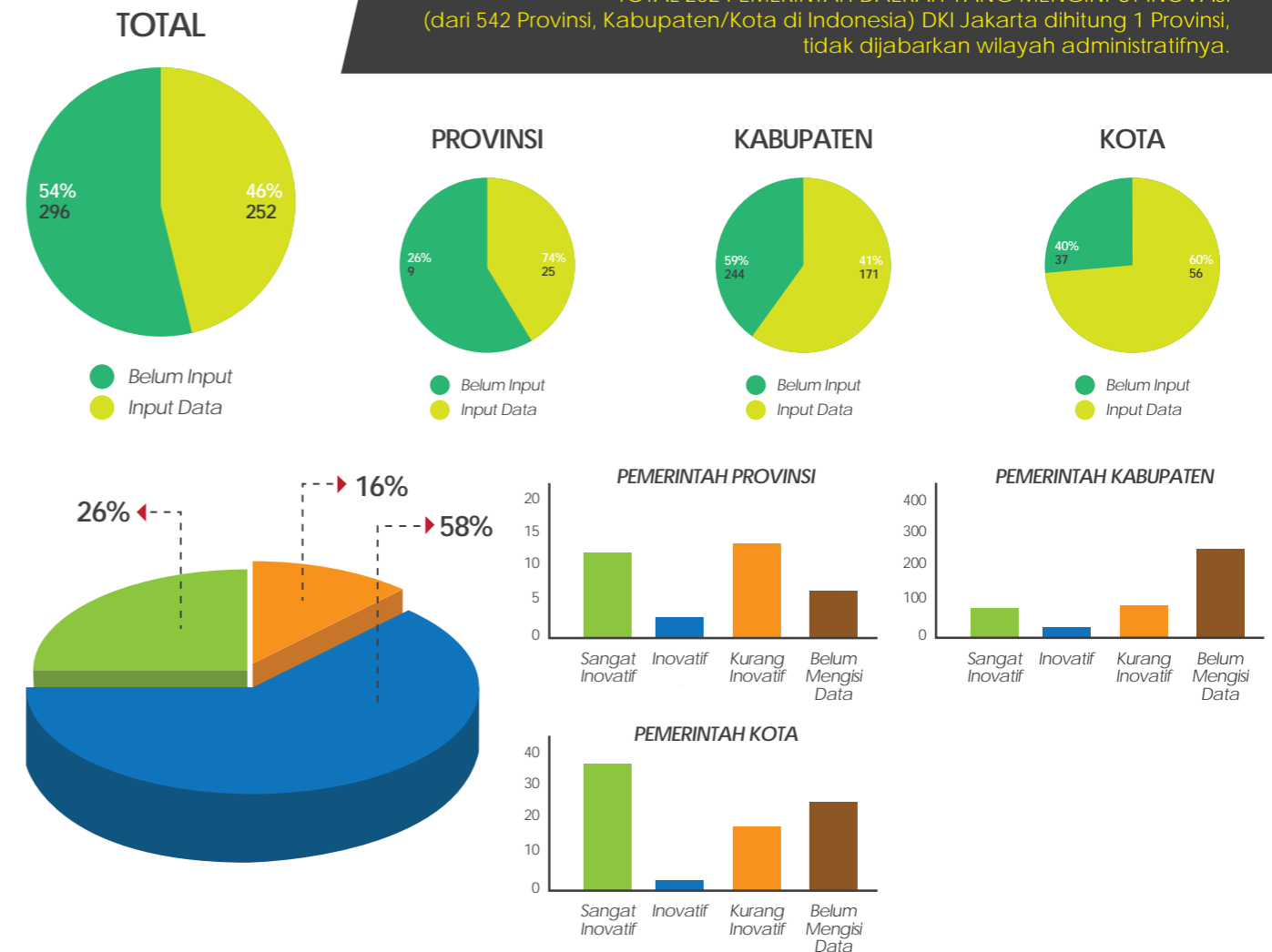


## PETA PEMBINAAN PROVINSI BERDASARKAN HASIL INPUT INDEKS INOVASI DAERAH



## KONDISI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2019

TOTAL 252 PEMERINTAH DAERAH YANG MENGINPUT INOVASI (dari 542 Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia) DKI Jakarta dihitung 1 Provinsi, tidak dijabarkan wilayah administratifnya.



# ATUR STRATEGI DI TENGAH PANDEMI

**S**EORANG PEGAWAI Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), terlihat memasuki sebuah bilik kecil terbuat dari bahan serupa kaca. Badannya memutar-mutar, dan muncul kepulan asap dari bagian atas bilik, seolah menyirami tubuh pegawai tersebut. Asap itu merupakan unsur disinfektan yang diyakini mampu mematikan virus corona atau Covid-19. Setelah keluar dari bilik, giliran suhu tubuhnya diukur, untuk mengetahui apakah derajatnya normal atau justru sebaliknya. Rendah tingginya derajat suhu tubuh, menjadi salah satu indikasi seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak.

Semenjak pandemi merebak di Indonesia, sejumlah kantor melengkapi fasilitasnya dengan beragam peralatan, tak terkecuali BPP Kemendagri. Selain bilik disinfektan dan pengukur suhu, cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan keran air mengalir lengkap dengan sabun, di tempatkan di sejumlah sudut kantor. Sebagai upaya pencegahan penyebaran, tangan dianjurkan sesering mungkin dicuci, entah menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.

Pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat daya tahan tubuh. Untuk itu, BPP Kemendagri memberikan se-



■ Sejumlah pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap gedung di BPP Kemendagri. Hal ini dilakukan sebagai upaya BPP untuk mencegah penularan covid-19





■ Pegawai BPP Kemendagri keluar dari bilik disinfektan. Penyediaan bilik disinfektan menjadi prioritas BPP untuk mencegah penyebaran Covid-19

jumlah vitamin kepada para pegawai. Karena penyebaran virus ini melalui percikan air liur (droplet), para pegawai juga diberikan masker.

Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt) BPP Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan mengatakan, sejumlah upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, sudah dilakukan di lingkungan BPP Kemendagri. Termasuk mengerahkan petugas kebersihan agar rutin membersihkan lingkungan sekitar kantor. Tak hanya di dalam ruangan, penyemprotan cairan ini juga dilakukan di luar gedung, dan sempat menerjunkan dua

unit mobil pemadam kebakaran. “Itu kerja sama dengan komponen Kemendagri lain dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

### Bekerja dari rumah

Sejak Presiden Joko Widodo mengimbau, agar masyarakat Indonesia dapat beribadah, bekerja, dan belajar dari rumah, lingkungan kantor terlihat sepi. BPP Kemendagri telah menerapkan kerja dari rumah, meski skemanya dilakukan secara bergiliran. Maurits mengatakan, pegawai yang piket diusahakan jumlahnya tak terlalu banyak. Bagi yang sudah merampungkan tugasnya, dianjurkan untuk segera kem-

bali ke rumah. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, pegawai yang masuk diharapkan dapat mengikuti prosedur kebersihan yang ada. “Kalau teman-teman yang masuk ke kantor bisa tertib dan mengikuti SOP (standar operasional prosedur) mudah-mudahan tubuh tetap dalam kondisi steril,” ujarnya.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, BPP Kemendagri, Hariyadi, menuturkan berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kebijakan bekerja dari rumah secara teknis diserahkan ke masing-masing komponen. Tahap pertama kerja dari rumah ini berlaku dari 18-31 Maret 2020, yang kemudian diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020.

Dalam menyusun jadwal pegawai yang piket dan kerja dari rumah, pimpinan BPP Kemendagri terlebih dulu mengumpulkan sejumlah unit kerja. Dari pertemuan ini, kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan daftar nama pegawai yang sudah terjadwal. Bagi pegawai yang piket, absensi dilakukan secara manual. Untuk mencegah penyebaran virus selama pandemi, absen elektronik (*fingerprnt*) tidak digunakan. Sementara bagi pegawai yang bekerja dari rumah, absennya dilakukan melalui pelaporan hasil kerja dan menginputnya dalam aplikasi



Sikerja, disertai bukti pendukung, seperti membagi lokasi, foto, dan bukti hasil pekerjaan sesuai ketentuan. Dalam keadaan mendesak, pegawai yang bekerja dari rumah, sewaktu-waktu dapat dipanggil ke kantor.

Hariyadi mencontohkan secara singkat bagaimana bekerja dari rumah dapat dilakukan. Saat seorang peneliti mendapat tugas dari Kepala Puslitbang untuk menyusun riset desain. Peneliti dapat mengirimkan bukti hasil peker-

jaannya ke Kepala Puslitbang.

Absen bagi pegawai yang bekerja dari rumah sebenarnya dapat difasilitasi melalui aplikasi *mobile simpeg* yang dapat dipasang pada gawai. Namun, Hariyadi menyebutkan, pegawai BPP Kemendagri belum siap menggunakannya, ditambah belum ada sosialisasi khusus dari Biro Kepegawaian Kemendagri ihwal teknis penggunaannya. Ia menyebutkan, belum semua komponen memanfaatkannya. “Barang itu memang masih dalam penyempurnaan-penyempurnaan,” ujarnya.

Kendati demikian, secara prinsip BPP Kemendagri akan menerapkannya jika aplikasi tersebut sudah dapat digunakan secara baik, dan mendapat penyuluhan dari Biro Kepegawaian Kemendagri. Hariyadi mengaku terus mengikuti perkembangan penggunaan aplikasi tersebut.

### Pengalihan anggaran

Sementara itu, pandemi yang terjadi di luar dugaan perencanaan anggaran ini, mengharuskan adanya penyesuaian. Presiden Joko Widodo, secara garis besar mengintruksikan agar penggunaan alokasi anggaran dapat difokuskan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Mendagri, melalui Plt. Sekretaris Jenderal Muhammad Hudori juga telah memberikan rincian alokasi anggaran sebagai upaya mempercepat penanganan Covid-19. Dalam surat bernomor 910/2599/SJ itu juga mengatur jumlah nominal yang perlu diberikan komponen Kemendagri untuk upaya percepatan penanganan di tingkat nasional. BPP Kemendagri sendiri, mesti mengalokasikan sejumlah Rp 1 miliar.

Maurits menuturkan, telah merealokasi anggaran yang menjadi arahan Mendagri. Adapun beberapa aspek yang dialihkan itu seperti perjalanan dinas, pelaksanaan rapat, belanja barang bahkan modal yang sifatnya pengurangan. Pengalihan anggaran dilakukan untuk kebutuhan internal, dan nasional dalam percepatan penanganan Covid-19.



■ Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Horas Maurits Panjaitan saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu

“**KEGIATAN KELITBANGAN IDENTIK DENGAN PENGAMBILAN DATA DI LAPANGAN. DENGAN BERKURANGNYA PERJALANAN DINAS HAL INI AKAN MEMENGARUHI KINERJA**”

Kepala Bagian Perencanaan, Mohammad Noval Labadjo, mengatakan kebijakan pengalihan anggaran dilakukan dengan melihat alokasi yang dimiliki BPP Kemendagri. Ia menyebutkan, upaya ini dengan memaksimalkan pagu anggaran di internal Sekretariat Badan, khususnya Bagian Umum. Setelah disisir, sekira 90 persen kebutuhan penanganan Covid-19 dapat terpenuhi. Beberapa kebutuhan yang masih belum tercukupi, menggunakan peralihan anggaran dari Pusat Litbang

ke kegiatan Sekretariat Badan. Kebijakan ini dilakukan dengan merevisi di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPP Kemendagri, sehingga prosesnya lebih cepat. “Jadi memang sesuai arahan, kita hanya revisi di tingkat KPA,” ujarnya.

Peralihan anggaran dilakukan dengan melihat kemungkinan sulitnya terealisasi secara jangka panjang akibat adanya pandemi. Kegiatan itu misalnya, perjalanan dinas dan rapat yang melibatkan orang banyak. Meski hal ini nantinya, sedikit banyak bakal memengaruhi capaian kinerja kelitbangan.

Noval menuturkan, kegiatan kelitbangan identik dengan pengambilan data di lapangan. Dengan berkurangnya perjalanan dinas hal ini akan memengaruhi kinerja. Namun, bukan berarti pekerjaan sama sekali mandek. Dengan bekerja dari rumah atau adanya pembatasan kegiatan, masih memungkinkan pencarian data penelitian atau berdiskusi dengan narasumber secara daring. “Kalau kita mau membayar narasumbernya bisa, yang penting bisa dibuktikan,” kata Noval meyakinkan.

Di sisi lain, saat pandemi ini mereda, Noval juga mempertanyakan kesiapan untuk melanjutkan kegiatan yang teragendakan. “Kalau bisa turun ke lapangan mungkin bisa berlanjut, tetapi apakah terkejar? Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.

■ MUJAENI



# apa kata mereka

**Kepala Sub Bagian PID BPP Kemendagri, Aji Nur Cahyo menyampaikan alasannya mengapa memilih tetap masuk ke kantor meski ada kebijakan WFH.**

"Ya soalnya tanggung jawab pada pekerjaan sih, bikin saya kepikiran terus kalau harus tetap di rumah. Selama saya merasa tidak mengalami gejala-gejala Covid-19 seperti demam, batuk, pilek dan sebagainya, saya tetap ke kantor dengan tetap mematuhi protokol anjuran dari pemerintah untuk social distancing. Strategi agar terhindar dari virus paling menyisakan bujet khusus untuk membeli asupan gizi yang baik dan multivitamin, serta olahraga setiap hari, minimal setengah jam sambil berjemur."



**Christian Ringkuangan Kalangi, Staf Penyusun Bahan Rencana Program dan Anggaran pada Tata Usaha Pimpinan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, memilih untuk sering masuk kantor.**

"Sebagai warga negara yang baik tetap ikut aturan dari pemerintah terkait social distancing sambil tetap menjaga kesehatan. Kemudian dalam menyelesaikan tugas kantor, tetap bekerja dengan opsi WFH. Namun, untuk anak kosan yang tidak memiliki fasilitas jaringan internet, saya memilih berangkat ke kantor agar memudahkan penyelesaian pekerjaan. Meski begitu, tetap harus memerhatikan aspek kesehatan dan keselamatan."



**Poppy Ayu Oktariana, Dokter Poliklinik BPP Kemendagri mengimbau, agar masyarakat yang mempunyai gejala dapat mengisolasi diri.**

"Gejala infeksi Covid-19 mirip dengan penyakit lain, seperti batuk, pilek, tenggorokan sakit, dan demam. Oleh karena itu, jika tubuh merasakan gejala tersebut, sebaiknya mengisolasi diri dengan berdiam di rumah selama 14 hari. Isolasi perlu dilakukan agar tidak menulari atau tertulari penyakit dari orang sekitar, apalagi yang bersangkutan tinggal di daerah zona merah penyebaran."



# di tengah wabah corona

Indonesia tengah dilanda wabah virus corona atau Covid-19. Presiden Joko Widodo mengimbau, agar masyarakat dapat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Istilah bekerja dari rumah kemudian terkenal dengan sebutan work from home (WFH). Selain itu, ada pula anjuran untuk melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Sementara itu, merespons berbagai anjuran kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri juga menerapkan beberapa upaya, seperti memberlakukan sistem bekerja dari rumah, melengkapi fasilitas kantor dengan alat pembersih, dan vitamin untuk para pegawainya. Para pegawai BPP Kemendagri, menyampaikan tanggapannya terhadap kebijakan pemerintah, serta upayanya dalam membentengi diri dari ancaman virus Covid-19 di tengah tuntutan kerjanya. Berikut kutipannya.

**Plt. Sekretaris BPP Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, terkait langkah kebijakan yang diambil BPP Kemendagri merespons Covid-19**

"Secara prinsip, langkah-langkah BPP Kemendagri sudah sampai pada tahap bagaimana mengondisikan orang yang datang ke kantor dan bekerja itu sudah dalam kondisi steril. Pengalihan anggaran untuk dialokasikan kepada tindakan pencegahan penyebaran virus Covid-19, baik internal maupun membantu dalam skala nasional. BPP Kemendagri juga telah menerapkan WFH, terlebih yang rumahnya jauh atau menggunakan transportasi umum. Selain itu, agar aktivitas kantor tetap terjaga WFH juga dilakukan dengan skema bergantian."



**Kapuslitbang Adwil, Kependudukan, dan Pemdes, Kurniasih ihwal dukungannya terhadap kebijakan WFH dan pembatasan sosial.**

"Pilihan untuk WFH adalah kebijakan yang paling tepat, karena Covid-19 harus diputus penyebarannya dengan social distancing (pembatasan sosial). Dan WFH dapat dilakukan dengan catatan kondisi smartphone yang kita miliki mendukung untuk bekerja dari rumah."



**Diyan Bagus Asmoro Staf Analis Pengembangan Karier, PJKSE mengungkapkan alasannya sering masuk kantor di tengah kebijakan WFH.**

"Alasan kenapa tetap masuk saat kondisi seperti ini, karena ada beberapa berkas yang tidak bisa dikerjakan di rumah dan membutuhkan tanda tangan pimpinan. Untuk itu, harapan kedepannya tanda tangan digital bisa segera diaplikasikan. Untuk pekerjaan lain seperti kolektif dan evaluasi data bisa dikerjakan di rumah asal semua data sudah tersimpan. Saat WFH tentunya jam bekerja, seperti jam biasa dan kondisi rumah diusahakan memunyai ruangan khusus untuk bekerja."





UNTUK MEMINIMALISASI PENYEBARAN COVID-19, PEMERINTAH DKI JAKARTA MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI SEJUMLAH JALAN PROTOKOL DI JAKARTA. PEMERINTAH DKI JUGA MELAKUKAN SOSIALISASI MELALUI BERBAGAI MEDIA TERKAIT PENTINGNYA JAGA JARAK DAN TETAP BERADA DI DALAM RUMAH



**PEDULI COVID19**  
Yuk kita cegah dan tangani bahaya penyebarannya...

1. Budayakan Hidup sehat, Seperti Olah Raga teratur, Cuci Tangan Sebelum dan sesudah beraktifitas.
2. Perkuat imunitas diri dengan makanan sehat, obat alami, dan istirahat yang cukup.
3. Segera Ke Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit atau sarana kesehatan lainnya jika anda demam lebih dari 37,5 C, Batuk, Pilek dan Sesak Nafas.
4. Tidak batuk, Bersin, Meleudah sembarangan dan gunakan masker.
5. Tidak berkontak langsung dengan orang lain, Cukup ucapkan salam Hormat.
6. Tidak menyentuh mata, Hidung, dan mulut sebelum cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

SUKU DINAS PEHUBUNGAN JAKARTA PUSAT

Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19), Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mendisinfektan sejumlah lokasi dan ruas jalan yang kerap dikunjungi publik. Penyemprotan disinfektan tersebut juga menggunakan mobil tangki Dinas Pemadam Kebakaran.





■ Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten Paundra Bayyu Ajie (paling kanan), ketika di temui beberapa waktu lalu di Serang Banten

# GENJOT PARIWISATA PASCA TSUNAMI SELAT SUNDA

Setahun pasca tsunami, aktivitas pariwisata di Banten masih terlihat lesu. Beberapa destinasi unggulan seperti Pantai Carita dan Tanjung Lesung sepi pengunjung. Untuk membangkitkan kembali pariwisata, pemerintah setempat terus berupaya menciptakan berbagai festival dan terus memperbaiki infrastruktur. Apalagi Banten juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pandeglang yang perkembangannya belum terlihat signifikan.

Pada 2018 lalu, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Banten sendiri menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak. Beberapa destinasi di Banten juga menyisakan trauma bagi masyarakat, pasalnya saat kejadian tersebut, beberapa seniman tengah menggelar konser, dan beberapa di antara mereka menjadi korban.

Setahun pasca tsunami tingkat kunjungan wisata Provinsi Banten juga tidak kunjung membaik. Dinas Pariwisata Provinsi Banten mencatat, jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata pantai di Banten pada 2019 mengalami penurunan signifikan hingga 60 persen dibanding tahun 2018. Tingkat kunjungan wisatawan juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah di Banten.

Misalnya, Kabupaten Pandeglang yang selama ini menjadi daerah dengan tempat wisata paling banyak mengalami penurunan penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah lesunya sektor pariwisata yang rendah. Realisasi penerimaan pajak dari sektor pariwisata di Kabupaten Pandeglang pada 2019 mengalami penurunan drastis. Sebagai contoh, realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang hingga triwulan ke III hanya mencapai Rp 34 Miliar, dari

target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp 48 Miliar. Jumlah pendapatan sektor pajak tersebut berasal dari 11 jenis pajak daerah salah satunya dari sektor pariwisata.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten Paundra Bayyu Ajie, saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Banten memprioritaskan 7 destinasi wisata Banten dengan branding *Banten Seven Wonders*. Ketujuh destinasi tersebut adalah Pantai Carita di Anyer, Banten Lama, Tanjung Lesung, Cisadane, Ujung Kulon, Sawarna, dan wisata Baduy di Lebak.

Selain itu, keseriusan pemerintah provinsi Banten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata juga ditunjukkan dengan pembuatan regulasi Perda Banten No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten. Dalam perda tersebut, Pemprov Banten menentukan 11 destinasi

pariwisata strategis di Provinsi Banten.

“Situ Rawa Arum serta kawaan Anyer dan Cinangka di Cilegon, Banten Lama dan sekitarnya di Kabupaten Serang, Cisadane di Tangerang, kawasan wisata Tangerang Utara, 3 destinasi di Kabupaten Lebak seperti Leuwi Damar, Sawarna, dan Bagedur, 3 lokasi di Pandeglang seperti Ujung Kulon, Pantai Carita, dan Tanjung Lesung,” kata Ajie.

## Pengembangan Kawasan Tanjung Lesung

Dari sisi pariwisata, dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Banten juga tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Tanjung Lesung yang merupakan destinasi prioritas pemerintah, dan termasuk dalam 10 Bali Baru tak kunjung mengalami perkembangan. Karena tidak ada perkembangan tersebut, Tanjung Lesung tidak masuk dalam 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. Kementerian Pariwisata menetapkan 5 Destinasi Super Prioritas dari 10 Bali Baru untuk dikembangkan yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Hal itu juga diakui oleh Eri Kepala Seksi Kawasan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Menurutnya sejak diresmikan pada 2014 lalu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang belum terlihat kemajuan yang signifikan. Bahkan tingkat kunjungan wisatawan ke KEK Tanjung Lesung menunjukkan persentase penurunan. Meski sejak 2015-2018 mengalami peningkatan wisatawan dengan rata-rata mencapai 37,02% per tahun. Tetapi sampai sebelum bencana tsunami menerjang, pada 2017-2018 hanya sekira 14,63% pertahun.

“Penurunan jumlah kunjungan wisatawan semakin memburuk setelah tsunami pada 22 Desember 2018. Misalnya, hunian kamar hotel di Tanjung Lesung sangat minim. Begitu juga beberapa tujuan wisata seperti Klub Resor dan Pantai, Pantai Bodur, Pantai Tanjung Kuntianak, dan Pantai Cipenyu sepi pengunjung.” Kata Eri.

Untuk memulihkan kembali kawasan, Pemprov terus mendorong dengan berbagai program. Ibnu dan Ryan dari Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Banten ketika ditemui beberapa waktu lalu di Serang, Banten mengatakan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) su-



dah mendukung melalui pengembangan daerah penyangga (*bufferzone*). “Saat ini telah membangun jalan seluas 14 meter hingga ke lokasi. Pemerintah juga mendukung pengembangan pariwisata sekitarnya untuk mendorong orang berkunjung ke sana,” ucap Ryan.

Tetapi Ryan menganggap selama ini permasalahan bukan dari pemerintah tetapi dari pengembang yang ada di dalam kawasan Tanjung Lesung. Sama halnya dengan Ryan, Ajie mengakui jika pengembangan KEK Tanjung Lesung memang terkendala, khususnya pasca tsunami. Namun menurutnya bukan berarti pemerintah provinsi tinggal diam. Sebagai Sekretariat Dewan Kawasan yang diberi mandat langsung Gubernur, Dinas Pariwisata melakukan berbagai hal untuk mendorong kunjungan ke sana. KEK Tanjung Lesung diakuinya mulai berbenah, meskipun hal yang merupakan hal sulit dan tidak mudah untuk menghilangkan trauma wisatawan.

Sama halnya dengan pihak Bappeda, Ajie juga mengakui jika pemerintah provinsi hanya berfokus di luar kawasan. Hal itu karena corak KEK Tanjung Lesung adalah KEK yang dikelola 100% oleh BUPP. Menurut Bayu pemerintah tidak bisa menyentuh

kawasan yang ada di dalam KEK secara langsung meskipun hanya sebuah kebijakan. Pemerintah provinsi juga tidak memiliki kewenangan lebih jauh, pasalnya KEK sudah menjadi urusan Kabupaten Pandeglang.

KEK Tanjung Lesung diajukan oleh PT. Banten West Java Tourism Development Corporation (BWJ) sebagai badan usaha pengusul dan telah memenuhi kriteria, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 PP No 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK. “Jadi pembangunan di dalam kawasan bukan lagi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu menjadi tanggung jawab

“

**BANYAK YANG MENILAI LAMBATNYA PERKEMBANGAN KEK TANJUNG LESUNG SELAMA INI DIKARENAKAN DAYA TARIK INVESTASI YANG RENDAH**



■ Pintu Gerbang dan salah satu fasilitas atraksi wisata di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Pandeglang, Banten.

pengembang,” ungkap Ajie.

Selama ini menurut Ajie pemerintah provinsi selalu membangun kolaborasi dengan PT BWJ, misalnya ketika pemerintah menyelenggarakan festival di sana. Dinas Pariwisata sebagai Dewan Kawasan juga rutin mendapat laporan dari Administrator KEK selama ini. Namun ia tak menyangkal jika kawasan masih membutuhkan investor dan membutuhkan pengembangan.

Banyak yang menilai lambatnya perkembangan KEK Tanjung Lesung selama ini dikarenakan daya tarik investasi yang rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut seperti infrastruktur dan aksesibilitas, jaminan insentif, permasalahan lahan dan pertanahan, serta sinergitas pengelola yang tidak terkoordinasi.

#### Terkendala infrastruktur

Di sisi lain, menurunnya jumlah kunjungan ke Tanjung Lesung juga disinyalasi karena beberapa faktor, selain trauma bencana tsunami setahun lalu, infrastruktur menjadi kendala utama. Letak Tanjung Lesung yang sangat jauh dari Jakarta dan Serang juga menjadi alasan. Selain itu, pembangunan jalan nasional dan provinsi menuju lokasi juga tidak diimbangi dengan pemba-

keberadaan jalan tol,” ucap Saprudin.

Selain tol, PT BWJ juga berharap pembangunan Bandara Banten Selatan segera dilaksanakan. “Bandara dan jalan tol nantinya akan mendatangkan pusat pertumbuhan baru, dan meningkatkan kelayakan finansial di kawasan tersebut. Bandara menjadi salah satu syarat utama pendirian KEK. Sama halnya dengan tol, Bandara Banten Selatan juga masih terkendala pembebasan lahan.” Tambah Saprudin.

#### Pertumbuhan baru

Meski secara umum KEK Tanjung Lesung dianggap paling tertinggal dari KEK Pariwisata lainnya, serta memiliki progress pembangunan yang cukup lambat, namun dampak keberadaannya cukup kentara di sekitar kawasan *bufferzone*. Ketika memasuki Panimbang menuju kawasan Tanjung Lesung, beberapa *homestay* banyak berdiri. Ramainya Pasar Panimbang juga diklaim pemda sebagai pengaruh dari keberadaan KEK. Begitu juga dengan aksesibilitas seperti jalan dari Serang-Tanjung Lesung nyaris bagus.

Saprudin mengatakan kehidupan ekonomi di sekitar KEK Tanjung Lesung terus tumbuh, ia mencontohkan pengaruhnya ketika tsunami menerjang, dan kawasan KEK sepi pengunjung, beberapa *homestay* di sekitar kawasan juga mengalami imbasnya. Untuk membuktikan ucapan Saprudin, Media BPP menemui penduduk setempat pemilik *homestay*. Salah seorang pemilik mengakui sudah hampir setahun tidak memiliki pengunjung yang menginap.

Sebenarnya, semenjak Tanjung Lesung ditetapkan sebagai 10 destinasi Bali Baru, pemerintah setempat juga sigap membangun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di area *bufferzone*. Pengebangan *homestay* mejadi salah satu strategi yang dikembangkan di kawasan oleh pemerintah Pandeglang. Tercatat saat ini sebanyak 107 *homestay* tumbuh di sana, bahkan *homestay* sekelas hotel tumbuh di sekitar daerah penyangga. Penginapan

di daerah penyangga menjadi inisiatif pemerintah memberikan kemudahan kepada pengunjung yang datang ke Tanjung Lesung dengan *budget* yang minim.

Menurut Wawan Ruswandi Administrator KEK Tanjung Lesung, Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) juga terus digenjut. Kelompok usaha kerajinan yang terdiri dari anyaman bambu, pengrajin batik tumbuh di Kampung Kepuh, Cipanon, Cikadu, dan Cikadu. “Begitu juga dengan kelompok usaha kuliner, seperti pengembangan olahan keripik bonggol di Kampung Kepuh dan olahan kelapa di Kampung Sukamulya, dan beberapa sentra lainnya yang tumbuh di sekitar KEK. Pemerintah meyakini bisa menumbuhkan 3857 UMKM dengan perkiraan omzet sekira Rp51,3 miliar,” terang Wawan.

Selain masalah infrastruktur dan investor, Facrizal Kasie wilayah I Ditjen Bina Adwil Kemendagri mengatakan Tanjung Lesung tidak memiliki daya tarik, pasalnya pihak pengembang tidak melakukan branding. “Padahal banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya, dengan membuat transit point di daerah Anyer, kemudian membuat transportasi laut ke sana. Cara-cara tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa destinasi wisata seperti dari Lombok menuju Gili Trawangan. Dengan transit poin, sudah otomatis menjadi aktivitas wisata. Jika hal itu dilakukan, menurutnya tidak perlu harus menunggu jalan tol yang pembangunannya memakan biaya besar dan waktu yang lama,” tegas Fachrizal.

Berbicara pariwisata tidak akan pernah lepas dari identitas lokal di sebuah kawasan di mana destinasi wisata itu berdiri. Identitas lokal merupakan ciri khas yang harus dipertahankan. Jangan sampai, ketika kompetisi bisnis di KEK semakin kuat, karakteristik di suatu daerah dan kearifan lokal justru tidak dilindungi bahkan dilupakan. Peran pemerintah daerah menjadi penting agar kearifan lokal berpadu dengan modernitas.

■ SAIDIRIFKY



LEBIH DEKAT

## Menulis sebagai Jalan Hidup

*Menulis menjadi jalan hidup Tri Widodo Wahyu Utomo (51). Kepiawaiannya membungkus persoalan lewat aksara, membawa lelaki kelahiran Yogyakarta ini, menjadi peneliti di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tak cukup di situ, kariernya merangkak menjadi Deputy Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. Pengalamannya di bidang kepenulisan, membantunya mengomandoi para peneliti.*

### Tri Widodo Wahyu Utomo

Deputy Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara

#### Tempat Tanggal Lahir :

Yogyakarta, 15 Juli 1968

#### Pendidikan :

S1 Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia

S2 Departemen Kerja Sama Internasional, Universitas Nagoya, Jepang

S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

**T**RI WIDODO mengambil sebuah buku dari lemari di ruang kerjanya. Buku tersebut terlihat tebal, berisi kliping tulisan-tulisannya yang terbit di surat kabar nasional. Widodo memang menggeluti aktivitas menulis. Ketertarikan itu tumbuh jauh sebelum ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bakatnya menulis sudah terasah sejak menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Widodo berusaha mengingat kembali kenangan kegiatannya saat kuliah. Kala itu, ia mendaftarkan diri di sebuah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Sebuah unit kegiatan mahasiswa yang kental dengan aktivitas menulis. Saat mendaftar mengikuti pelatihan dasar, dia diberi apresiasi khusus karena mampu menghadirkan tulisan dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika yang lain menulis persoalan yang dinilai “serius”, seperti ekonomi, politik, Widodo justru menyoroti ihwal kebiasaan anggota LPM tersebut yang gemar kerokan secara jemaah. Laku ini merupakan upaya anggota untuk menghilangkan rasa pegal. Ia melihat ada semangat kerja sama yang kental, setelah begadang dan mengerjakan tugas-tugas organisasi. Insting jurnalisnya

terbangun dan menuntunnya melihat persoalan dari sudut pandang yang unik. “Dasar-dasar jurnalistik itu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain,” ujarnya.

Hidup Widodo memang tak jauh dari dunia kepenulisan. Mengawali kariernya sebagai PNS, Widodo mendapat tugas dari pimpinannya untuk menanggapi sebuah tulisan yang terbit di surat kabar Pikiran Rakyat, yang menyoal rendahnya gaji PNS. Tanggapan tersebut ia tulis, dan dimuat di media yang sama.

Menyadari minatnya condong dalam kepenulisan, enam tahun setelah diangkat menjadi PNS, Widodo kemudian beralih formasi ke jabatan fungsional sebagai peneliti pertama. Peneliti dan menulis ibarat dua sisi mata uang, tak terpisahkan. Tak keliru, jika periode ini membuat Widodo makin giat menuangkan beragam pikirannya ke dalam tulisan, dan terbit di berbagai media publikasi, baik jurnal ilmiah maupun media massa. “Hasrat saya untuk menulis semakin menjadi-jadi,” ujarnya.

Saat melanjutkan pendidikan strata dua pada 2002 di Jepang, kebiasaan mengirim tulisan ke berbagai media masih ia lakoni. Justru saat itu Widodo mengaku memiliki banyak waktu untuk menulis. Ia kerap mengikuti berbagai konferensi, dan rajin

mempublikasikannya. Berkat beragam tulisan yang terbit, dua tahun sekali status jenjang jabatan penelitiannya naik.

#### Isu yang diangkat

Widodo mengingat beberapa tulisan yang pernah ditulis, misalnya yang terbit di surat kabar *Sinar Harapan* yang berjudul “Birokrasi yang Frustrasi”. Tulisan ini merespons perilaku pemerintah daerah yang menertibkan parkir liar dengan cara menggembosi ban, bahkan menggemboknya. Menurutnya, peristiwa ini menunjukkan, birokrasi mengalami frustrasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Sebab, telah menerapkan cara-cara penyelesaian yang tidak dibenarkan. “Masa iya kita *ngempes-in* atau menggembok ban orang, *kan enggak boleh*,” ujarnya. Widodo menyamakan, tindakan yang dilakukan serupa menggembok rumah orang.

Tindakan menggembok dan menggembosi, menurutnya, hanya bisa dilakukan setelah ada perintah dari pengadilan. Meski pemerintah memiliki diskresi atau kewenangan yang kuat tindakan semacam itu tidak dibenarkan. Pemangku kebijakan mestinya mencari cara yang lebih kreatif, bagaimana mampu mengondisikan pengendara agar disiplin.

Selain itu, dirinya juga sempat menyoroti kebiasaan pemerintah yang kerap membentuk tim untuk mengatasi suatu persoalan. Tulisan yang diberi judul “Tim dalam Perspektif Administrasi Publik” tersebut terbit di *Media Indonesia*. Widodo mencontohkan beberapa persoalan yang penanganannya kerap diiringi dengan pembentukan tim baru. Ia menyebutkan, upaya penertiban pasar, misalnya. Padahal, persoalan ini menjadi bagian yang dapat ditangani dinas yang mengelola pasar. Pembentukan tim juga terjadi saat hendak melakukan operasi miras. Padahal, pemerintah daerah sudah memiliki unit penanganan, yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP). “Kenapa harus selalu ada tim? Dan ternyata jumlah tim itu begitu banyak,” ujarnya.

Ia menyebutkan, setiap organisasi perangkat daerah sudah memiliki kewenangannya masing-masing. Karenanya, pembentukan tim baru tidak perlu dilakukan. Pembentukan tim baru hanya akan menunjukkan peran organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, tidak lagi berfungsi. Ketika Satpol PP tidak dilakukan adalah memperkuat unit tersebut, bukan justru membuat tim yang berbeda. “Kurang SDM-nya kah? Maka tambah anggarannya, kurang anggarannya kah? Tambah anggarannya,” ujarnya.

Pembentukan tim baru perlu dihindari, karena menjadi bayang-bayang bagi sebuah OPD. Praktik di lapangan, tim tersebut kerap lebih diutamakan ketimbang OPD yang sudah terbentuk. Karenanya, koordinasi menjadi kunci untuk memperkuat perannya masing-masing. “Itu problem kita dari dulu sampai sekarang, koordinasi mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dilakukannya,” ujarnya.

Menanggapi beragam tulisannya yang terbit, Widodo menyadari sebagian besar bernuansa kritik. Namun, ia melakukannya sebagai upaya perbaikan terhadap penanganan atas persoalan. Sejauh melahirkan karya, Widodo mengaku belum ada pihak yang mengeluhkannya.

#### Menanggalkan

Namun aktivitas menulis tersebut tak segetol dahulu, setelah adanya aturan pelarangan rangkap jabatan bagi ASN. Widodo memang sempat mendapat promosi ke jabatan struktural. Namun pada 2014, lahir UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang disusul dengan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Aturan tersebut mengatur rangkap jabatan tidak lagi diperbolehkan. Walhasil, Widodo menanggalkan status jabatan fungsionalnya, yang saat itu sudah menginjak sebagai peneliti utama. Meski begitu, ia sempat menerbitkan buku berjudul “Inovasi Harga Mati” yang merupakan kumpulan dari tulisannya terdahulu.

Saat ini Widodo menduduki jabatan sebagai Deputy Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN. Di bidang penelitian, perannya lebih banyak mengomandoi kerja-kerja para peneliti di bawahnya. Ia rajin mengajak mereka untuk berdiskusi, agar menambah wawasan dan memperkaya cara pandang atas persoalan. Proposal penelitian yang diusulkan, ia tanggapi dan dikoreksi. Pengalamannya sebagai peneliti, diakui membantunya dalam menjalankan tugas tersebut. “Tuntutan peneliti itu adalah harus mampu melihat sesuatu di balik peristiwa atau kenyataan,” ujarnya. Dengan mampu melihat sesuatu di balik peristiwa, maka unsur kebaruan dari penelitian akan didapatkan.

Keahlian menguak sesuatu di balik peristiwa, dapat diasah dengan membangun pengetahuan, salah satunya lewat sering berdiskusi. Peneliti, kata Widodo, tidak boleh larut dengan hidupnya sendiri, tetapi harus memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar. “Peneliti tidak boleh larut dalam ruang hampa, tidak sadar diri dengan lingkungan,” ujarnya.

Meski saat ini menjabat sebagai Deputy, Widodo berharap suatu saat nanti dapat kembali melakoni perannya sebagai peneliti dan mampu menerbitkan banyak buku. “Ada satu mimpi yang belum tercapai, yaitu menjadi profesor riset,” ujarnya.

■ MUJAEI



## Benarkah Sinar UV Bisa Bunuh Virus Corona?

**D**I TENGAH kecemasan global tentang wabah Covid-19, gagasan tentang mendisinfeksi kulit, pakaian, atau benda lain dengan sinar UV menjadi populer. Di Thailand, sebuah perguruan tinggi dilaporkan telah membangun terowongan UV yang dapat dilalui oleh para siswa untuk mendisinfeksi diri mereka sendiri. Jadi, apakah ini cara yang baik untuk melindungi diri dari Covid-19? Dan apakah benar sinar matahari bisa membunuh virus corona, seperti yang dilaporkan beberapa media sosial?

### Sinar berbahaya

Sinar matahari mengandung tiga jenis UV. Pertama UVA, yang membentuk sebagian besar radiasi yang mencapai permukaan bumi. Sinar ini mampu menembus jauh ke dalam kulit dan dianggap bertanggung jawab atas 80 persen penuaan kulit, dari keriput hingga bintik-bintik penuaan. Selanjutnya UVB, yang dapat merusak DNA di kulit kita, menyebabkan kulit terbakar dan akhirnya kanker kulit (baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan bahwa UVA juga dapat melakukan ini). Keduanya cukup dikenal, dan dapat diblokir oleh *sunblock* yang paling baik.

Selanjutnya, ada juga tipe ketiga yakni UVC. Bagian spektrum yang relatif tidak jelas ini terdiri dari panjang gelombang cahaya yang lebih pendek dan lebih energik. Sinar ini dapat menghancurkan bahan genetik baik pada manusia atau partikel virus. Untungnya, sebagian besar dari kita tidak mungkin pernah bertemu dengan sinar UVC lantaran telah disaring oleh ozon di atmosfer jauh sebelum mencapai kulit manusia. Para ilmuwan menemukan bahwa mereka dapat memanfaatkan UVC untuk membunuh mikroorganisme.

Sejak ditemukan pada 1878, UVC yang diproduksi secara artifisial telah menjadi metode pokok sterilisasi yang digunakan di rumah sakit, pesawat terbang, kantor, dan pabrik setiap hari. Selain itu, UVC juga digunakan untuk proses sanitasi air minum, sebab beberapa parasit resisten terhadap desinfektan kimia seperti klorin.

Meskipun belum ada penelitian yang melihat bagaimana UVC mempengaruhi Covid-19 secara khusus, penelitian telah menunjukkan bahwa UVC dapat digunakan terhadap virus corona lain, seperti SARS. Radiasi UVC mampu melengkungkan struktur materi genetik mereka dan mencegah partikel virus membuat lebih banyak salinan dari diri mereka sendiri. Akibatnya, bentuk UVC sekarang di garis depan dalam pertarungan melawan Covid-19.

Di China, seluruh bus diterangi oleh cahaya biru suram setiap malam, sementara squat, robot pemancar UVC telah

membersihkan lantai di rumah sakit. Bank bahkan telah menggunakannya untuk mendisinfeksi uang mereka. Pada saat yang sama, pemasok peralatan UV telah melaporkan rekor penjualan, dan banyak yang segera meningkatkan produksi untuk memenuhi pesanan mereka. Kesimpulannya diperlukan waktu berjam-jam untuk mendapatkan sengatan matahari dari UVB, tetapi dengan UVC dibutuhkan beberapa detik. Selain itu, untuk menggunakan UVC dengan aman, dibutuhkan peralatan dan pelatihan khusus.

### Solusi sinar matahari?

Kemungkinan sinar UVA atau UVB dapat mendisinfeksi sesuatu. Tetapi, kita tidak bisa bergantung dengan sinar tersebut. Di negara berkembang, sinar matahari sudah menjadi cara yang populer untuk mensterilkan air bahkan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Teknik ini melibatkan menuangkan air ke gelas atau botol plastik bening, dan membiarkannya di bawah sinar matahari selama enam jam. Diperkirakan berhasil karena UVA di bawah sinar matahari bereaksi dengan oksigen terlarut untuk menghasilkan molekul tidak stabil seperti hidrogen peroksida, bahan aktif dalam banyak desinfektan rumah tangga, yang dapat merusak patogen. Penelitian tentang SARS, kerabat dekat Covid-19 menemukan bahwa mengekspos virus ke UVA selama 15 menit tidak berdampak pada seberapa infeksi itu. Namun, penelitian ini tidak melihat paparan yang lebih lama, atau UVB, yang diketahui lebih merusak bahan genetik.

Sebaliknya, virus lain mungkin bisa, contoh flu. Ketika para ilmuwan menganalisis catatan rumah sakit di Brasil, mereka menemukan bahwa jumlah kasus flu cenderung meningkat ketika ada lebih banyak asap di atmosfer dari kebakaran hutan sehingga berkurangnya sinar UV. Studi lain menemukan bahwa semakin lama partikel flu terpapar sinar matahari dan semakin terkonsentrasi, semakin kecil kemungkinannya untuk tetap menular. Sayangnya, penelitian itu mengamati flu yang melayang di udara, bukannya mengering pada benda.

Sementara itu, tidak ada yang tahu berapa lama untuk menonaktifkan Covid-19 dengan sinar matahari dan seberapa kuat sinar UV yang dibutuhkan. Semua ini berarti, menggunakan sinar matahari untuk mendisinfeksi permukaan untuk mencegah virus corona masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, mendisinfeksi kulit dengan segala jenis UV akan menyebabkan kerusakan, dan meningkatkan risiko kanker kulit.

SAIDI RIFKY/DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

## Menghindar dari Serangan Wabah Corona

**W**ABAH penyakit yang diakibatkan virus *corona* atau Covid-19 tengah menjalar di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Virus yang pertama kali merebak di Kota Wuhan, China ini telah memakan sejumlah korban jiwa. Meski tingkat kematian yang diakibatkan virus tersebut terbilang rendah, virus ini tetap dikatakan berbahaya. Dokter yang bertugas di Poliklinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), dr. Poppy Ayu Oktariana, menyebutkan yang membuat virus ini berbahaya adalah penyebarannya yang begitu cepat. Ia mengatakan, penyebaran virus ini melalui percikan air liur (*droplet*) dan mampu bertahan hidup saat menempel di benda dalam kurun waktu tertentu.

Karena penyebarannya begitu cepat, maka perlu melakukan upaya jitu untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Langkah yang dinilai tepat adalah dengan membatasi pergerakan sosial. Imbauan tersebut sudah diterapkan di Indonesia dengan memberlakukan *sosial distancing*, dan menganjurkan masyarakat tetap tinggal di rumah selama wabah terjadi.

dr. Poppy memberikan sejumlah anjuran pola hidup sehat yang dapat diterapkan masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

### Rajin mencuci tangan

dr. Poppy menuturkan, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dinilai ampuh membasmi virus. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, melalui mukosa basah seperti mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, ia melarang aktivitas menyentuh wajah karena bisa jadi menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh. Mencuci tangan baiknya dilakukan sesering mungkin. Dibanding

*hand sanitizer*, mencuci tangan dengan sabun dinilai lebih ampuh karena dapat merusak kulit virus.

### Menggunakan masker

Penyebaran Covid-19 yang melalui percikan air liur (*droplet*), membuat pemerintah memberlakukan kebijakan jaga jarak. Untuk memperkecil kemungkinan menghirup *droplet* yang dikeluarkan atau memercikan air liur, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup mulut dan hidung.

### Menjaga daya tahan tubuh

Penyakit yang diakibatkan virus bersifat *self-limiting disease*, atau penyakit yang membatasi dirinya sendiri. Menurut dr. Poppy jika daya tahan tubuh seseorang bagus maka penyakit itu bakal sembuh sendiri. Untuk memperoleh daya tahan tubuh yang kuat, minimal istirahat yang cukup selama 8 jam. Selain itu, perlu mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang seperti sayur, buah, dan lainnya. Konsumsi air putih 8 gelas sehari.

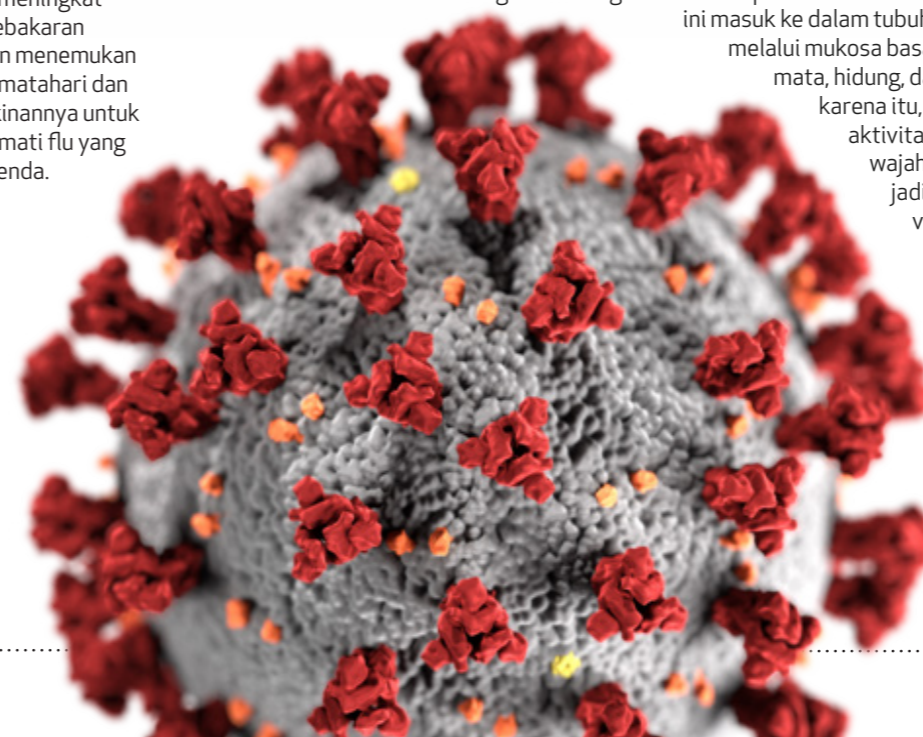
Selain itu, dapat pula dilakukan dengan menjemur tubuh di bawah sinar matahari selama 5-10 menit. Aktivitas ini tujuannya untuk mendapatkan vitamin D. Jenis vitamin ini dapat diperoleh dari sinar matahari sekira pada pukul 09.00-10.00-an. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saat berjemur kondisi tubuh diusahakan dalam keadaan terbuka. "Kalau vitamin D-nya cukup, maka daya tahan tubuh kita bagus," katanya.

### Mengisolasi diri

Gejala infeksi Covid-19 mirip dengan penyakit lain, seperti batuk, pilek, tenggorokan sakit, dan demam. Oleh karena itu, jika tubuh merasakan gejala tersebut, sebaiknya mengisolasi diri dengan berdiam di rumah selama 14 hari. Isolasi perlu dilakukan agar tidak menulari atau tertulari penyakit dari orang sekitar, apalagi yang bersangkutan tinggal di daerah zona merah penyebaran. Sebab, orang dengan gejala seperti ini sudah tergolong dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP).

Di tengah situasi seperti ini, jika tidak begitu darurat, masyarakat diimbau untuk tidak sering mengunjungi rumah sakit, klinik, Puskesmas dan sebagainya. Sebab, tempat seperti itu berisi berbagai bakteri maupun virus karena menerima pasien dengan beragam kondisi. Untuk menghindari penularan, baiknya konsultasi kesehatan dilakukan melalui layanan *online* atau telepon.

■ MUJAJENI



## Uang dan Kebijakan, Ikon Pemerintah(-an) Visioner

**M**EMBENTURKAN kompleksitas harmoni hidup bernegara dengan keanekaragaman tuntutan adalah siasat utopis jika enggan dikatakan gagal. Era kontemporer atau zaman kiwari ini menjadi bukti gamblang bahwa bayang-bayang kegagalan menggoda di pelupuk mata. Terhamparlah masalah-masalah makro seputar gurita uang dan kebijakan pemerintah yang setengah hati.

Prof Carunia Mulya Firdausy secara jاتمika menelanjangi benturan masalah kontemporer yang senantiasa membelit perekonomian nasional dan daerah. Dengan lihai, Prof. Carunia memilah dikotomi frontal antara perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dikotomi masalah dalam buku ini ditegaskan berdasarkan pumpunan enam artikel riset. Jadi, tersaji data dan fakta valid seputar permasalahan nasional dan daerah.

Dalam kaitannya dengan masalah perekonomian nasional, secara khusus buku ini memfokuskan persoalan yang menyangkut nilai tukar rupiah, ekspor industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran dan lapangan kerja, serta energi baru dan terbarukan untuk pengembangan kelistrikan nasional. Dalam kaitannya dengan masalah perekonomian daerah, buku ini memfokuskan evaluasi kebijakan transfer fiskal, desentralisasi dan pelayanan publik, serta strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan studi lapangan di Provinsi Yogyakarta dan Bojonegoro.

Sebagai sentilan awal buku ini, masalah makroekonomi nasional adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika selalu naik. Lonjakan nilai tukar ini berimbas terhadap indikator

makroekonomi yang juga tidak mengembirakan. Mengapa produk ekspor Indonesia menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan produk ekspor yang sama dari negara lain dalam hitungan dolar Amerika? Kasus ini menumpulkan upaya pemerintah ketika akan menyerap tenaga kerja, malas dalam peningkatan investasi, gagal mengurangi jumlah penduduk miskin, maupun gagal menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat (hlm 2).

Imbas pelemahan nilai tukar uang ini berdampak pula terhadap masalah yang menyangkut aplikasi kebijakan. Era kiwari pun membutuhkan harmoni uang dengan kebijakan, terutama kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Nyaris dua puluh tahun sejak sah tahun 2001 silam, gema otonomi daerah dan desentralisasi perlu diawasi. Ada UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Bukankah dua UU ini telah sempurna direvisi? Adakah cambuk kebijakan ini menggiring ke pola pikir yang lebih mendewasakan?

Plus minus sinergi uang dan kebijakan mutlak vital diperhatikan agar perekonomian nasional dan daerah pada tahun mendatang semakin membaik. Ingat efek tahun politik 2019, ketidakpastian global sebagai akibat perang dagang AS dengan Cina, kenaikan suku bunga AS, kenaikan harga minyak, revolusi industri 4.0, dan kini pelumpuhan ekonomi mondial karena covid-19.

Buku ini terdiri atas delapan bagian. Bagian pertama (prolog) dan kedelapan (epilog) ditulis langsung oleh Prof



### Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah

**Penulis** : Carunia Mulya Firdausy

**Penerbit** : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

**Cetak** : 2019

**Tebal** : xiv + 178 halaman

**ISBN** : 978-602-433-703-2

Carunia. Ada enam bagian isi artikel riset yang didiskusikan oleh periset andal: Rasbin, Achmad Sani Alhusain, Juli Panglima Saragih, Mandala Harefa, Ari Muliarta Ginting, dan Lisnawati.

Masalah klasik yang selalu penting dalam negara adalah investasi, lapangan kerja, dan pengangguran. Masalah ini memabukkan. Pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dapat dijadikan salah satu kebijakan ekonomi jangka panjang yang harus dicapai dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Jika pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti pembukaan lapangan kerja, muncullah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini memicu peningkatan kemiskinan.

Indikator ini ditelusur Achmad Sani Alhusain (hlm 30). Pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja. Coba kilas balik, khususnya Indonesia yang pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk lebih dari 261 juta orang. Menjadikan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, selain faktor modal, alam, dan teknologi. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi perluasan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang ada dapat diserap. Berdasarkan data BPS per Februari 2018, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133.939.099 orang. Dari jumlah ini sebanyak 6.871.264 orang atau sebesar 5,13 persen masih menganggur. Apakah pemerintah sudah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar untuk dapat membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia? Apa kabar investasi di Indonesia?

Solusinya, secara teoretis, para ekonom mengklaim, investasi adalah penolong peluang kesempatan kerja yang besar bagi angkatan kerja di Indonesia sehingga pengangguran berkurang. Logikanya, ketika pengusaha, individu, atau pemerintah berinvestasi, ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa mendatang. Bagaimana faktanya?

Pemerintah telah berupaya mendorong terciptanya peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA melalui terobosan 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Cara ini direspons positif oleh pe-

meringkat internasional (UNTAD dan World Bank). Hasilnya, perkembangan investasi Indonesia menanjak, tetapi belum signifikan meningkatkan pembukaan lapangan kerja yang masif luas dan banyak. Faktor penghambatnya disebabkan investasi yang berkembang masih terlena pada kegiatan padat modal (serbamesin atau digital) dan teknologi. Mengapa investasi melupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja manusia? (hlm 51)

Kebijakan setengah hati dari permainan investasi juga terendus dalam maksimalisasi potensi energi supaya mudah mencapai kemandirian dan ketahanan energi. Sungguhkah niat ini?

“  
UANG, INVESTASI,  
PENGANGGURAN,  
LAPANGAN KERJA, DAN  
ENERGI TERSEBUT  
SELALU MEMBENIHKAN  
PROBLEMATIKA KLASIK.  
MENGAPA PEMERINTAH  
GAGAP KETIKA  
DIBENTURKAN DENGAN  
TAGIHAN KEBIJAKAN?”

Juli Panglima Saragih menemukan kebijakan setengah hati yang selalu semu. Banyak persoalan yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan. Salah satunya adalah pola perilaku masyarakat yang sudah sangat nyaman dan sulit melepas ketergantungan terhadap energi fosil. Dukungan dari setiap lapisan masyarakat dibutuhkan agar pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan dapat berjalan dengan baik. Jaminannya jika pemerintah tegas membuat perangkat hukum yang baik. Bagaimana fakta di lapangan?

Energi terbarukan sudah menjadi tren dan menjadi kebutuhan energi di Indonesia sejak tahun 2000-an. Palsunya,

sumber energi tak terbarukan semakin menipis (minyak mentah, gas bumi, dan batubara). Pemerintah sudah mengerem ladang baru untuk pemanfaatan energi fosil ini, terutama porsi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri. Akan tetapi, anehnya pemerintah justru hingga saat ini masih gencar menambah dan membangun PLTU yang bersumber energinya adalah batubara.

Hingga saat ini diakui bahwa payung hukum mengenai energi baru dan terbarukan belum dibuat. Namun sudah ada UU No 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, UU No 10 Tahun 1997 tentang ketenagakuiliran, dan UU No18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu ada kepastian hukum tentang regulasi dan kebijakan pengembangannya.

Uang, investasi, pengangguran, lapangan kerja, dan energi tersebut selalu membenihkan problematika klasik. Mengapa pemerintah gagap ketika dibenturkan dengan tagihan kebijakan?

Buku ini ditutup oleh simpulan bernas Prof Carunia Mulya Firdausy (hlm 160). Buku ini ditujukan untuk sumbang saran positif yang terkait dua aspek. Pertama, upaya mengatasi berbagai isu dan problematika nilai tukar rupiah, investasi, industri manufaktur, pengangguran, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Kedua, menyangkut kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal daerah dan cara mendorong desentralisasi fiskal agar mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Setidaknya, Prof Carunia melentikkan enam kebijakan baru dan positif bagi para pemikir dan pemangku kuasa demi harmoni pemenuhan kebutuhan uang dan kebijakan. Bahasa mudahnya, ada uang, ada kebijakan atau payung hukum yang menjaminkannya.\*

\*ANTON SUPARYANTA, Alumni FIB UGM, kontributor naskah tentang pendidikan-seni-budaya-sastra di beberapa harian pagi (Jawa Pos, Koran Jakarta, Lampung Post, Riau Pos, Solopos, Suara Merdeka, Radar Madura, Kabar Madura, KR, Minggu Pagi, buletin rohani, majalah INSPIRASI KAS Semarang, majalah Pewara Dinamika UNY), jurnal daring BASABASI.CO, portal sastra LITERA.CO.ID, majalah sastra SIMALABA.COM, dan majalah NEOKULTUR.





**Crash Landing on You**

**Sutradara:**

Lee Jeong-hyo

**Pemain:**

Hyun Bin

Son Ye Jin

Seo Ji-hye

Kim Jung-hyun

DLL

**Produksi:**

Studio Dragon

Culture Depot

**Tayang:**

14 Desember 2019 s.d

16 Februari 2020



## Manisnya Romansa Utara dan Selatan

**W**ALAU PUN episode terakhir berakhir 16 Februari kemarin, namun kisahnya masih tertinggal di hati para penonton.

Setelah penayangan lebih dari dua bulan, penonton dibuat kagum dengan keseluruhan isi ceritanya. *Crash Landing On You* berhasil menggeser rating drama Goblin yang pernah mencetak rekor tertinggi di saluran tvN dengan rating 21,6.

Ber cerita tentang putri konglomerat dan pimpinan bisnis fashion bernama Yoon Se Ri (Son Ye Jin) yang tertimpa badai saat melakukan paragliding dan terjatuh di Korea Utara. Yon Se Ri bertemu Ri Jung Hyuk (Hyun Bin), putra tunggal Direktur Biro Politik Umum Korea Utara yang sedang berpatroli di zona militer Korea Utara. Berbagai cara dilakukan Ri Jung Hyuk untuk membantu Yon Se Ri pulang ke Seoul, namun usahanya selalu gagal, terpaksa Yon Se Ri tinggal sementara dengan Ri Jung Hyuk. Kisah cinta Yon Se Ri dan Ri Jung Hyuk mulai

bersemi ketika mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama baik senang maupun duka. Namun sulit, cinta mereka terhalang intrik ideologi negara dan mustahil untuk bersatu.

*Crash Landing On You* tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 KST, atau pukul 19.00 WIB di saluran TV Kabel tvN dan Netflix. Drama ini menampilkan 16 episode dengan genre *romance*, komedi, dan *action*. Cerita yang unik, penampilan apik pemain, dan sinematografi menjadi kunci keberhasilan drama ini. Selain itu, pemilihan OST (Official Soundtrack) yang diputar tiap *scene* drama ini menambah emosi penonton sehingga hanyut dalam perasaan. *Crash Landing On You* sukses mengaduk-aduk hati penonton sehingga selalu dinanti tiap episodanya. Narasi sedih, tegang, bahagia, dan haru berhasil disampaikan pemain kepada penonton.

Sebelum menggarap *Crash Landing On You*, Lee Jung-hyo menyutradarai

*Romance is a Bonus Book*, *Criminal Minds*, *A Witch's Love* dan *In Need of Romance 2012*. Naskah *Crash Landing On You* ditulis oleh Park Ji-eun yang merupakan pencipta dari deretan drama populer seperti *My Love From the Star*, *The Producers*, dan *The Legend of the Blue Sea*.

Lee Jung-hyo harus mengemas drama ini semirip mungkin dengan latar tempat Korea Utara. Penggambaran dilakukan secara detail, jelas, dan menyeluruh agar mampu ditangkap penonton sehingga memberikan kesan nyata suasana Korea Utara. Logat bahasa, cara berpakaian, hingga arsitektur bangunan dibuat semirip mungkin dengan keadaan Utara. Selain itu, Penggambaran adegan pemadaman lampu saat malam, kereta mogok selama 10 jam, Razia dadakan, dan pasar tradisional menambah kesan nyata Korea Utara. Sutradara dan tim produksi berkonsultasi dengan penasihat asal Korea Utara yang telah lama tinggal di Selatan. Pengambilan gambar nuansa Korea Utara sesungguhnya dilakukan di Pulau Jeju, Chungju,

Incheon, Busan, dan Mongolia.

Selain menampilkan peran apik Hyun Bin dan Son Ye Jin, drama ini juga mengundang pemain film *Parasite* seperti Jang Hye Jin dan Park Myung Hoon. *Crash Landing On You* juga banyak menghadirkan deretan aktor ternama drama Korea seperti Kim Jung Hyun, Seo Ji-hye, Kim Sun Young, dan actor pendukung lain.

Drama ini menyajikan kesan berbeda karena tidak hanya pemain utama yang banyak mengambil peran, pemain pendukung seperti para prajurit bawahan kapten Ri Jung Hyuk dan para istri tentara yang tinggal di kompleks militer berhasil menciptakan karakter yang kuat dengan pembawaan lugas dan santai

Dibalik kesuksesan drama ini, ternyata cerita yang dibawakan menuai protes dari kedua negara yang terlibat di dalamnya. Pertama, tuan rumah produksi drama ini, Korea Selatan. Pihak Korea Selatan menganggap setting cerita Korea Utara terlalu humanis dan mempropagandakan Korea

Utara dengan nilai yang salah. Kedua, drama ini diprotes Korea Utara, mereka tidak setuju dengan penggambaran rakyat Utara yang tertinggal, miskin, dan korupsi. Pihak Utara juga menuduh drama ini sudah menyalahi paham komunis, dan parahnya mereka juga mengecap penonton drama ini tidak bermoral.

Terlepas dari gugatan yang dilontarkan kedua negara yang selalu bersitegang, dari drama ini banyak sekali makna yang disampaikan. Cuplikan adegan yang menunjukkan mereka saling membantu, berempati, dan saling melindungi merupakan sedikit gambaran bahwa sejatinya kita semua adalah makhluk sosial.

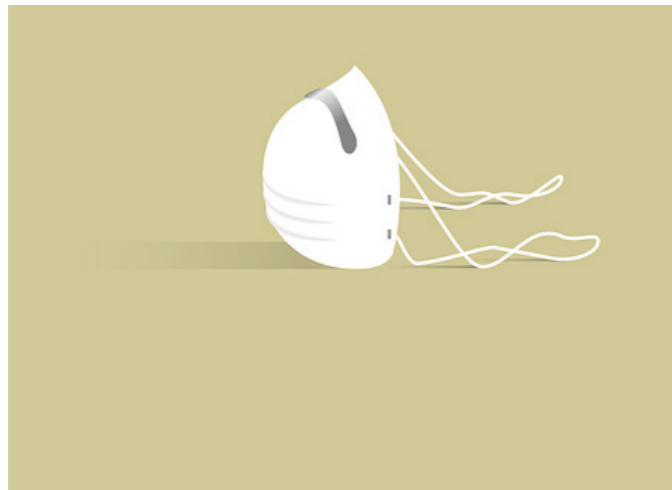
Setelah *Crash Landing On You* tamat, serial drama baru yang akan tayang seperti *Hi Bye Mama*, *Itaewon Class*, *If The Weather is Good I'll Find You*, dan *The King (Eternal Monarch)*. Agar tidak bosan selama #DiRumahAja saat pandemic Covid-19, silakan tonton drama Korea untuk menemani hari-harimu di rumah.

■ FARIDA UBAY

## Corona Sialan!

Hari Taqwan Santoso\*

**A**“ALAH, CORONA TAHI KUCING!” seru Pak Kabul sambil menusukkan rokoknya ke asbak kuat-kuat. Lalu dia meraih topi koboi yang selalu dia pakai pergi bekerja, lalu berangkat. Satu tujuannya, pasar hewan. Pak Kabul tetap berangkat di tengah huru-hara virus corona yang sudah mendunia, meskipun tempo hari sudah ada himbauan dari kelurahan



tahari terbenam, bahkan sekalipun itu masih belum lewat jam delapan. Di tengah situasi yang demikian itu, Pak Kabul pernah bertengkar dengan istrinya lantaran dia mau pergi ke warung malam hari, sedangkan istrinya tidak mengizinkan karena termakan oleh isu ninja pembunuh itu dan sangat khawatir dengan keselamatan sang suami. Benar atau tidak, faktanya desa tempat

melalui Ketua RT untuk tetap tinggal dan tidak keluar rumah, jika terpaksa keluar, warga harus menghindari kerumunan, paling tidak untuk dua minggu ini. Kata Pak RT, hal itu demi menyegah penyebaran virus yang terlalu cepat sehingga rumah sakit-rumah sakit yang disediakan khusus untuk pasien penderita penyakit Covid-19 bisa menangani mereka semua. Jika ada terlalu banyak orang yang harus ditangani dalam waktu yang sama, maka para dokter akan kewalahan karena kalah jumlah, dan itu berarti bencana bagi semuanya.

Penjelasan itu masuk akal, tapi Pak Kabul tidak pernah tahu apa itu virus dan bencana apa yang bisa dihasilkan karena seumur hidup tidak pernah mengenal dunia di luar desanya sendiri. Perasaannya terombang-ambing antara percaya, atau tidak percaya.

Mendekati tahun 2000, pikir Pak Kabul ketika ketidakpercayaan sedang meliputi hatinya, ada sebuah kabar yang tersebar luas di tengah masyarakat desanya, yaitu kabar tentang ninja yang menyulik dan membunuh orang tanpa alasan. Semua warga menjadi ketakutan karena kabar itu, mereka tidak berani keluar rumah setelah ma-

Pak Kabul tinggal tidak pernah kehilangan seorang warga pun akibat diculik dan dibunuh ninja. Jangan-jangan, simpul Pak Kabul, berita tentang Corona ini juga hanya informasi palsu yang disebar untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak keluar rumah.

Pak Kabul adalah orang dari generasi “zaman lama” yang masih tersisa. Generasi yang memandang sekolah sebagai tindakan menghabiskan uang. Generasi buta huruf yang bahkan tidak dapat berbahasa Indonesia karena memutuskan untuk putus sekolah jauh sebelum tamat SD dan memilih untuk mengolah sawah, berdagang atau menjadi buruh karena kegiatan-kegiatan yang disebut belakangan itu menghasilkan uang sementara sekolah justru sebaliknya. Di desanya, pada zamannya orang-orang yang berpikiran seperti Pak Kabul ini biasa, hasilnya adalah satu generasi yang tidak bisa baca-tulis.

Sekarang pun, ketika orang-orang dapat mengakses informasi umum apa pun di belahan dunia lain saat itu juga dengan bantuan internet, Pak Kabul masih tidak tahu apa-apa. Sebab dia tidak bisa mengoperasikan benda seseperti *smartphone*. Dia tidak tahu bahwa ketika be-

rita-berita tentang Virus Corona mulai muncul, banyak orang Indonesia termasuk pejabat tinggi pemerintah yang meremehkan virus itu. Dia tidak tahu bahwa sebagian pejabat berkata bahwa virus itu tidak bisa masuk ke Indonesia, karena hawa negeri ini terlalu panas bagi si virus untuk bisa bertahan hidup, dan ternyata itu terbukti salah besar. Dia tidak tahu, sebagian pejabat yang lain mengatakan bahwa makan nasi kucing atau sayur lodeh, atau joged-joged ala Tik-Tok bisa menangkal virus, yang terbukti salah besar juga. Sebagian pejabat tingkat tinggi yang lain lagi, mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak akan terkena Virus Corona karena saleh, banyak berdoa sehingga atas perlindungan Tuhan virus tersebut tidak berani datang untuk mengganggu, dan ini di kemudian hari juga terbukti SALAH BESAR. Dia tidak tahu semua itu.

Pak Kabul tidak tahu apa-apa di luar kehidupannya sehari-hari di desa: sawah-rumah-pasar hewan.

Meski demikian, tahu atau tidak dan percaya atau tidaknya Pak Kabul tentang apa pun yang berkaitan dengan Virus Corona ini, baginya itu tidak mengubah apa pun sebab sehari-harinya dia bekerja di sawah, yang bukan merupakan tempat orang berkerumunan. Lima hari sekali dia pergi ke pasar hewan untuk melakukan jual-beli kambing. Seandainya berita-berita tentang Virus Corona ini bukan sekadar isapan jempol belaka, pikiran Pak Kabul, maka pasar hewan itulah tempat yang harus dia hindari. Pada mulanya dia enggan untuk tidak pergi ke pasar hewan, keuntungan yang dijanjikan di pasar tersebut terlalu menggiurkan untuk tidak diambil. Namun setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk tidak pergi melihat tetangga-tetangganya juga tidak keluar rumah. Bukan berarti dia pada akhirnya menjadi percaya pada adanya Virus Corona yang kata orang sudah mendunia ini, tapi karena dia segan saja pada Pak RT. Pak Kabul harus berdebat alot dengan Pak RT kalau dia membantah perintah dari kelurahan, supaya semua orang tetap tinggal di rumah atau paling minimal menjauhi kerumunan orang demi kebaikan bersama.

Satu-dua hari setelah dikeluarkannya imbauan itu, Pak Kabul bisa tetap tinggal di rumah tanpa beban. Bagaimanapun, pekerjaan di sawah tidak akan membuatnya berada di tengah-tengah kerumunan orang. Pun juga, bagi para petani padi sekarang ini adalah musim

“tenang”, musim padi yang mereka tanam sudah tumbuh “dewasa” sehingga pupuk tidak lagi diperlukan, tinggal menunggu bulir-bulirnya bernas dan siap dipanen sambil mengontrol pengairannya.

Intinya, di tengah lalu lalang kabar tentang Virus Corona ini, Pak Kabul hanya harus berhenti pergi ke pasar hewan barang dua atau tiga kali, berdasarkan anjuran untuk tinggal di rumah minimal dua minggu itu. Dan dia sangat percaya diri bahwa dirinya bisa melakukannya tanpa halangan berarti. Namun, Pak Kabul tidak sampai memikirkan akibatnya lebih jauh. Pekerjaannya di sawah baru memberikan hasil setelah sekian bulan, entah dalam bentuk bahan makanan yang dipanen, atau uang, ketika bahan-bahan makanan itu dijual di pasar. Beras di rumah Pak Kabul sudah menipis, dan dia juga bertanya-tanya ketika istrinya mulai mengeluhkan harga gula, kopi dan rempah-rempah bumbu dapur yang naik hampir dua kali lipat dalam dua minggu terakhir.

“  
PEKERJAANNYA DI SAWAH BARU MEMBERIKAN HASIL SETELAH SEKIAN BULAN, ENTAH DALAM BENTUK BAHAN MAKANAN YANG DIPANEN, ATAU UANG, KETIKA BAHAN-BAHAN MAKANAN ITU DIJUAL DI PASAR

Karena perubahan drastis yang terjadi secara mendadak ini, Pak Kabul kehabisan uang sementara panen masih lama. Akhirnya, pada hari kesebelas, dia tidak punya pilihan selain pergi ke pasar hewan untuk mengadu nasib. Pak Kabul adalah seorang blantik (makelar) kambing ulung. Dan dia sangat pandai bernegosiasi. Dia pandai membujuk orang untuk menjual kambing padanya dengan harga semurah mungkin atau membeli kambing darinya dengan harga semahal mungkin. Jika dia sedang tidak punya uang, dia bahkan bisa meyakinkan si penjual kambing supaya pembayaran ditangguhkan setelah kambing itu terjual kembali olehnya.

Pak Kabul biasa berangkat ke pasar pagi-pagi agar bisa membeli dari para penjual kambing yang datang pagi-pagi juga, lalu langsung menjualnya kembali ke para pembeli yang berangkat lebih siang. Keuntungan yang bisa dia peroleh lumayan, sangat cukup untuk kehidupan istri dan kedua orang anaknya dengan standar kehidupan orang-orang desa pada umumnya. Memang, perdagangan tidak selalu menguntungkan, sesekali dia pernah rugi juga. Sesekali, pada pagi yang sial, dia membeli kambing dengan harga yang sebenarnya wajar, namun ketika dijual kembali, semua calon pembelinya menganggap harga yang dia tawarkan terlalu tinggi. Akhirnya, karena tidak mau membawa pulang kambing

itu, yang nantinya akan merepotkan karena dia harus memberi makan sampai pasar buka kembali lima hari ke depan, dia menjualnya dengan harga di bawah harga beli sehingga menanggung kerugian beberapa ratus ribu. Tapi ini jarang terjadi. Pak Kabul jauh lebih banyak menghasilkan untung daripada rugi. Sekali lagi, ini berkat kemampuan ulungnya dalam bernegosiasi.

Dengan motor bututnya, Pak Kabul melaju pelan, menelusuri setiap jalan yang mengarah ke pasar hewan. Jalan lengang, dan dia sekarang berubah heran. Keadaan para tetangganya, mestinya kurang lebih sama seperti dia, kekurangan beras dan tidak punya uang karena sudah mengurung diri selama beberapa hari. Mayoritas mereka adalah petani dan pedagang di pasar desa. Bagaimana mungkin mereka masih bisa tinggal di dalam rumah? Dan sejauh ini Kelurahan belum mengumumkan solusi yang lebih bisa diandalkan untuk orang-orang desa. Kelurahan mestinya hanya menuruti himbauan dari atas bahwa orang-orang seharusnya bekerja dari rumah. Tapi, bagaimana itu dilakukan di desa? Bagaimana menyangkul tanah-tanah di sawah dari rumah, bagaimana menukar beberapa kilo beras menjadi rempah-rempah bumbu dapur dari rumah? Bagaimana memakelari penjual dan pembeli kambing dari rumah?

Pertanyaan-pertanyaan itu terus bertambah, tapi Pak Kabul harus mengalihkan perhatiannya dari mereka karena dia sudah sampai di tempat parkir pasar hewan. Dia tersentak kaget ketika mendapati motor yang terparkir di sana hanya ada tiga. Pak Kabul memang biasa berangkat pagi-pagi ke pasar, namun di jam ini seharusnya sudah ada puluhan motor di sana. Sebelum berangkat tadi dia masih sempat melihat jam, dia benar-benar yakin tidak berangkat terlalu pagi. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tukang parkir pun juga tidak ada. Pak Kabul masih belum yakin dengan apa yang dilihatnya, dia beranjak memasuki pasar hanya untuk mendapati dua orang blantik lain yang berwajah kecut. Tidak ada penjual, tidak ada pembeli, tidak ada kambing. Pak Kabul mengucapkan serangkaian kata-kata untuk

“**INI BISA DIPAHAMI, KARENA ORANG-ORANG TAKUT DENGAN ISU CORONA. AGAK SIANG NANTI MUNGKIN BANYAK ORANG DI SINI**”

menghibur diri dalam hati, “Ini bisa dipahami, karena orang-orang takut dengan isu Corona. Agak siang nanti mungkin banyak orang di sini!”

Pak Kabul menghampiri salah satu blantik, yang adalah kawan lamanya. Setelah basa-basi, bertanya kabar dan sebagainya, dia mengajak orang itu menunggu di kedai kopi. Orang itu menolak, jadi dia pergi sendiri ke kedai kopi langganannya yang terletak di sisi barat, di dalam pasar. Kebetulan, hanya itu satu-satunya warung yang buka, dan si pewarung tidak lain adalah tetangganya sendiri. Warung gulai, warung nasi pecel dan warung soto yang biasa dikunjunginya di dalam pasar itu ketika sedang mengantongi banyak untung, tutup semua.

“Eh, Pak Kabul. Silakan, silakan,” si pewarung mempersiapkan sambil tersenyum menyambut kedatangannya. Tapi dia tahu bahwa pewarung itu hari ini sama kecutnya dengan dia.

Pak Kabul meletakkan topi kobo ke-sayangannya sambil memesan kopi. Meskipun baru saja ngopi di rumah, rasanya tidak apa-apa ngopi lagi. Minuman yang satu itu tidak pernah membosankan baginya, dalam keadaan apa pun.

“Sepi ya, Yu?” tanya Pak Kabul basa-basi.

“Sepi banget Pak,” kata si pewarung. “Hari ini saya pengennya mau tutup saja, nurut saran dari kelurahan. Tapi, bagaimana? Saya dan anak-anak butuh makan. Eh, sudah berusaha tetap buka, malah tidak ada orang di sini!” Si pewarung kemudian menceritakan keadaannya di rumah.

Pak Kabul yang biasanya lebih banyak berbicara dalam percakapan, sekarang diam mendengarkan cerita-cerita hidup si pewarung sepuluh hari terakhir ini.

Pak Kabul terus mendengarkan sampai tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat, matahari meninggi dan tak seekor kambing pun muncul di pasar hewan itu. Dia lalu keluar dari warung dan memutuskan untuk pulang saja.

“Corona Sialan!” umpatnya geram.

\*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel The Jazab Boy (Diva Press, 2012), Mandaraka (RWTC, 2017) Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan (Bebook Publisher, 2016), Sajak-Sajak Rembulan Biru (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.

KOMIK BANG PEPE  
**JANGAN MUDIK**



## Bersatu Melawan Pandemi

**A**PA YANG terjadi dengan dunia saat ini, seperti halnya bukan sebuah fiksi seperti di film-film yang pernah kita lihat. Dunia tengah digemparkan oleh virus berbahaya. Pertama kali virus ini terdeteksi oleh Komite Kesehatan Kota di salah satu pasar di Wuhan, Ibu Kota Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Setelah diidentifikasi, virus ini merupakan jenis baru dari virus korona. Virus ini sebelumnya sudah pernah menyebabkan penyakit seperti MERS (Sindrom Pernapasan Timur Tengah) dan SARS (Sindrom Pernapasan Akut Parah). Virus korona jenis baru ini kemudian diberi nama SARS Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dan saat ini dikenal Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*).

Penyebaran dari virus ini sangat cepat dan masif. Sejak diumumkan oleh pejabat kesehatan Tiongkok di awal Januari 2020, jumlah yang terinfeksi meningkat drastis ke angka 200 kasus dalam beberapa hari, dan mulai menyebar ke negara lain seperti Thailand dan Jepang. Tidak adanya kemungkinan kasus di Thailand dan Jepang yang berkunjung ke pasar di Wuhan mengindikasikan penyebaran dilakukan antar-manusia. Pada akhir Januari 2020, sudah terjadi 2.000 kasus dan mulai menyebar ke Taiwan dan Amerika Serikat dengan jumlah kematian mencapai 20 orang. Sejak itu, WHO menyatakan wabah ini sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan adanya tindakan internasional yang terkoordinasi. Pada Februari, virus menyebar semakin cepat ke luar Tiongkok yaitu ke negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Negara-negara yang paling terdampak adalah Italia, Iran, dan Korea Selatan. Kemudian, WHO menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi, yaitu tingkatan tertinggi dari penyebaran penyakit. Virus ini sudah menyebar ke 201 negara dengan jumlah kasus mencapai 471.035 dan 21.283 kematian.

Di Indonesia, kepastian masuknya Covid-19 terjadi awal Maret 2020, di mana kasus pertama dan kedua tertular dari seorang warga negara Jepang yang singgah di Depok dari Malaysia. Dalam waktu seminggu meningkat menjadi 19 kasus, dan dalam dua minggu meningkat menjadi 134 kasus. Indonesia sudah mengalami pertumbuhan eksponensial pada minggu ke tiga sudah mencapai 579 kasus. Tercatat 26 Maret 2020, sudah terjadi 790 kasus positif dengan jumlah korban 58 orang dan sembuh 31 orang. Angka-angka tersebut adalah data yang ter-



laporkan dan terdeteksi secara laboratorium. Sehingga, masih ada kemungkinan banyak warga yang terinfeksi namun belum terdeteksi atau tidak melapor. Dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat kematian di Indonesia sangat tinggi, dan tingkat kesembuhan masuk dalam kategori rendah.

Sejak diumumkan sebagai pandemi global, penyebaran virus ini mengalami percepatan yang signifikan. Pada skenario ter-

buruk, akan terjadi penularan cepat karena minimnya upaya penanggulangan untuk memperlambat penyebaran virus. Pada kondisi ini, banyak orang akan sakit secara bersamaan. Kemudian berdampak pada ketersediaan dan kesiapan fasilitas kesehatan. Tenaga medis, atau peralatan pelengkap seperti ventilator tidak akan cukup untuk menolong sekian banyak orang yang terinfeksi, akibatnya akan banyak pasien tidak tertolong. Ketika tenaga medis mengalami kelelahan, kapasitas fasilitas kesehatan juga menurun. Apabila situasi tersebut terjadi, maka harus ada keputusan buruk yang diambil mengenai pasien mana yang harus diselamatkan. Keadaan demikian terjadi di Italia, yang mengalami ledakan pasien dengan keterbatasan fasilitas kesehatan dan medis yang tersedia.

Menurut WHO, kita dapat melihat apa yang terjadi di masa depan berdasarkan persebaran virus korona di dunia, dengan mempelajari negara-negara terdampak, yang belum terdampak, dan negara di mana wabah ini dimulai. Jika kita melihat seperti Eropa, Amerika Utara dan Timur Tengah, hingga pertengahan Maret 2020 mereka masih memasuki periode pertumbuhan eksponensial. Ini menunjukkan, masih akan terjadi peningkatan secara cepat penderita Covid-19. Untuk mengantisipasi covid-19, beberapa negara melakukan kebijakan penguncian wilayah (*lockdown*). Ini adalah salah satu bentuk antisipasi untuk menurunkan kasus.

Kasus pengidap Covid-19 dapat diturunkan apabila pemerintah melakukan tes pada setiap orang dan melakukan isolasi kasus dengan cepat. Namun, apabila kebijakan *lockdown* diberlakukan tanpa alasan, maka dipastikan akan mengalami gelombang besar kasus Covid-19 di masa depan. Setiap negara yang melakukan *lockdown* harus juga tetap melakukan usaha untuk menemukan kasus-kasus penderita Covid-19 secara maksimal. Sehingga setiap kasus bisa direspons lebih awal.

Respons awal yang tepat pada fase awal penyebaran merupa-

kan hal yang krusial agar pasien tetap mendapatkan perawatan. *Sosial distancing* merupakan syarat utama dalam memperlambat persebaran virus. Hal ini juga akan berdampak pada kondisi fasilitas kesehatan yang terjaga kapabilitasnya. Semakin cepat dan tanggap pemerintah kita akan kasus-kasus baru dan penanganannya, maka pertumbuhan eksponensial ini bisa ditekan.

Pemerintah perlu mempelajari keberhasilan dan kesiapan negara-negara lain dalam menghadapi wabah agar tidak salah dalam melakukan kebijakan. Kasus tingginya kasus Covid-19 dan kematian di Italia merupakan salah satu contoh ketidaksiapan dalam menghadapi Covid-19. Namun tidak dengan Jepang dan Korea Selatan dalam menghadapi virus secara cepat dan disiplin. Jepang tidak menerapkan '*lockdown*', tetapi membatasi pergerakan warganya, termasuk menghentikan beberapa kegiatan. Kebijakan Jepang juga dilakukan Singapura dan Hongkong. Singapura berhasil mencegah penularan karena pendekatan yang dilakukan semua aspek pemerintahan, sedangkan Hongkong sangat cepat untuk menemukan kasus-kasus Covid-19 yang ada di wilayah mereka. Korea Selatan menerapkan *trace-test-treat* dengan melibatkan banyak laboratorium yang ada di seluruh negeri, melakukan test Covid-19 massal gratis (rujukan dokter) hingga harga yang terjangkau dengan waktu diagnosa yang cepat, mengembangkan *big data*/sistem informasi tentang Covid-19, kebijakan imigrasi khusus untuk pendatang dari Tiongkok, kebijakan cuti dan karantina 14 hari, melakukan investigasi pasien Covid-19 dan sterilisasi lingkungan, hingga mengeluarkan peraturan pendukung berupa sanksi tegas pelanggar kebijakan terkait Covid-19.

Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona yang dipimpin Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, saat ini merupakan salah satu kebijakan yang cukup tepat. Mengingat, sejak teridentifikasi di beberapa daerah di Indonesia, kepala daerah seakan melakukan tindakan sendiri yang minim koordinasi ke pemerintah pusat. Kebijakan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari rekomendasi WHO. Melalui gugus tugas ini diharapkan penanganan Covid-19 dapat terarah dan tidak salah langkah. Gugus tugas inilah yang dapat melakukan intervensi di berbagai daerah, serta memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang menyembunyikan, atau menutupi adanya penularan virus tersebut. Hal ini dimaksudkan guna memotong laju pertumbuhan serta potensi penularan yang semakin meluas.

Strategi yang dilakukan Gugus Tugas ini menitikberatkan pada isu ketersediaan layanan dan kesiapan tenaga kesehatan, upaya pengendalian penyebaran dan mitigasi dampak, serta komunikasi publik untuk menjaga stabilitas dan dampak sosial.

Hari Prasetyo  
Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kemennterian Dalam Negeri



Strategi tersebut dilakukan dengan beberapa rekomendasi ke pemerintah, antara lain: memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat; memastikan akses informasi dan data sebagai pengambilan keputusan; memastikan tersedianya dukungan teknis penanganan Covid-19; memastikan tersedianya layanan kesehatan yang optimal dan aman; memastikan pengendalian kasus Covid-19 melalui *massive screening*, pembatasan sosial dan karantina diri; melakukan *lockdown* modifikasi atau aturan yang tegas di daerah prioritas seperti DKI Jakarta; dan memastikan upaya mitigasi dampak dan penggunaan teknologi dalam penanganan Covid-19.

Langkah-langkah strategis tersebut sudah cukup matang direncanakan oleh Gugus Tugas. Namun, seperti halnya yang terjadi di Italia, Spanyol, Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara lain baik melalui persiapan maupun tidak tetap mengalami kasus Covid-19 dan kematian yang tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara lain dengan distribusi umur, kapasitas kesehatan, dan temperatur yang hampir sama justru tidak mengalaminya. Ini menunjukkan ada faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap penyebaran virus ini.

Ada banyak variabel berpengaruh yang belum kita ketahui dalam melawan virus ini. Kita tidak dapat melihat musuh kita, berapa banyak, dan bagaimana menyerang dan melumpuhkan Covid-19. Inilah perang bersama yang harus kita lalui, tanpa harus berlomba-lomba menemukan negara mana yang akan menemukan vaksin terlebih dahulu. Atau berlomba-lomba memenangkan angka dalam grafik pandemi Covid-19. Pemerintah harus terus bekerja keras mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan Covid-19, masyarakat seharusnya menjadi patuh dan penurut, serta tidak '*ngeyel*' terhadap kebijakan-kebijakan terkait Covid-19 seperti *physical distancing*, di rumah saja, ataupun *lockdown* yang sifatnya modifikasi yang nantinya mungkin akan dilakukan pemerintah. Dalam perang ini, semua pihak seharusnya benar-benar memainkan perannya secara maksimal dan bekerja sama agar pandemi ini segera berakhir.

Mengutip pesan dari duta besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Wabah ini tidak seperti lomba lari sprint 100 meter, di mana yang cepat bakal menang, dan untuk memenangkan perang terhadap wabah ini, adalah seperti melakukan maraton, yaitu yang memiliki daya tahan dan kerja sama yang paling baiklah yang akan menjadi pemenangnya. Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menang dan merdeka melalui perang gerilya dan bangsa para pejuang tentunya, harus memiliki daya tahan dan kerja sama yang baik dari semua warga negaranya. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakatnya wajib bersatu melawan wabah ini.

## Mainstreaming Pembangunan Rendah Karbon di RPJMD

PASCA PENGESAHAN penganggaran berbasis kemakmuran (*well-being budget*), Selandia Baru kembali mengguncang dunia ketika menyepakati dokumen yang akan membawa percepatan pencapaian komitmen Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) di tahun 2050. Dengan demikian, Selandia Baru akan tercatat di antara beberapa negara yang sudah mendeklarasikan secara nyata upaya mencapai pertumbuhan emisi nol persen (*zero emission*) sekaligus membatasi level pemanasan global di suhu 1,5<sup>o</sup> celcius. Menariknya, kesepakatan tersebut dicapai secara aklamasi oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun seluruh perwakilan partai di dalam parlemen. Hal inilah sekiranya membuat iri banyak negara lain karena meyakinkan parlemen untuk ikut mendukung upaya mengatasi pemanasan global bukanlah hal yang mudah.

Cerita lainnya, di Indonesia sendiri meski masih terus berproses namun pada 2019 kemarin dengan dibantu Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), telah menerbitkan laporan tentang Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia. Di dalam pengantar laporan dijelaskan, tinjauan dilakukan dengan mempertimbangkan status sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia sekaligus sebagai negara kepulauan terluas. Keberhasilan ekonomi yang dicapai dalam beberapa kurun waktu dikhawatirkan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang masif. Beberapa indikator menunjukkan gejala ini diantaranya: laju perubahan tata guna lahan yang masih besar, salah satu negara terbesar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus bergantung kepada penggunaan *fossil fuel*.

Secara umum, OECD memberikan rekomendasi beberapa peluang dan hambatan bagi pengembangan isu pertumbuhan hijau di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi peluang di antaranya: tingginya keanekaragaman hayati, modernisasi tata kelola guna lahan, potensi energi terbarukan yang besar dan masih belum tergarap dengan baik, integrasi target lingkungan rendah karbon dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional serta kemajuan penerapan kebijakan fiskal



hijau melalui pengurangan subsidi *fossil fuel* serta mekanisme penandaan anggaran.

Untuk tantangan, beberapa yang dicoba disampaikan dalam tinjauan diantaranya: meningkatnya emisi GRK dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, hutan dan lahan gambut yang kaya karbon secara perlahan mulai hilang, infrastruktur dan sumber daya pengelolaan limbah dan air tidak memadai, kapasitas kelem-

bagaan dan koordinasi di level pemerintah masih lemah serta penerapan pajak lingkungan dan instrumen ekonomi lainnya belum maksimal.

### Strategi pembangunan rendah karbon di RPJMD

Momen peluncuran laporan OECD ini sekiranya menjadi menarik jika dikaitkan dengan peluncuran dokumen Strategi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) oleh Bappenas beberapa periode sebelumnya. Kerangka strategi tersebut dibingkai dalam laporan "*Low Carbon Development – A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*". Secara umum laporan tersebut berupaya menerjemahkan paradigma baru dalam menjalankan pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia yang berlandaskan berbagai aktivitas rendah emisi dan ramah lingkungan. *Output* dari strategi tersebut adalah dihasilkannya peta jalan yang pasti menuju ekonomi hijau lintas generasi. Di dalam laporan juga disebutkan, eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang masih berlangsung hingga saat ini, berbagai investasi beremisi tinggi sekaligus penggunaan energi dan sistem transportasi yang tidak efisien telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang relatif masif di Indonesia.

Bukti-bukti banyaknya kerusakan lingkungan yang belum tertangani, dapat dijumpai secara mudah. Investigasi *bbc.com*, misalnya, mengingatkan betapa cepatnya laju penurunan permukaan tanah di Jakarta ataupun laporan beberapa lembaga internasional terkait kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Keseluruhan hal ini cukup menjadi fakta perlunya isu degradasi lingkungan ini mendapat perhatian yang lebih memadai. Terlebih ketika dikaitkan dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam mengembalikan fungsi

lingkungan. Biaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan saja, dalam hitungan Bank Dunia nilainya setara dengan 1,9% PDB nasional.

Dokumen laporan tersebut memberikan deskripsi yang jelas ketika pola pembangunan konvensional terus saja dilakukan, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih cepat berada di titik batas daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*). Sementara laju pertumbuhan penduduk justru terus bertambah bagai deret ukur dan deret hitung. Pembangunan konvensional juga memberi membatasi potensi pertumbuhan ekonominya sendiri karena penggunaan sumber daya dan fungsi produksi dipercepat di periode saat ini. Ingat bahwa teori ekonomi klasik memberikan pelajaran di periode jangka panjang (*long run period*) perekonomian akan berada pada kondisi *full employment* dan *full capacity*.

Ketika ekonomi sudah mencapai titik daya dukung dan daya tampung, satu-satunya cara untuk terus melanjutkan pertumbuhan melalui penciptaan kreasi dan inovasi teknologi. Daya dorong kreasi dan inovasi teknologi pun akan makin optimal ketika pola pembangunan sudah mengarah kepada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pada tahapan inilah manfaat penurunan laju destruksi SDA saat ini akan terasa seiring dengan semakin mahalnya harga input di periode mendatang.

Karenanya pemerintah memang sudah selayaknya melakukan transformasi pola pembangunan ekonomi sedari dini, sekaligus memikirkan bagaimana bentuk ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang kekinian. Hingga saat ini, ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi masih didasarkan kepada hitungan Produk Domestik Bruto (PDB) semata, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas hidup, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Praktik penggunaan Indeks Kebahagiaan Nasional di Bhutan atau dimulainya *Well-Being Budget* oleh Pemerintah New Zealand, harusnya menjadi pengingat, angin perubahan sudah mulai nyata.

Sebagai bagian dari komunitas global, sejak 2009 pemerintah sebetulnya sudah menyatakan komitmen atas penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional sebesar 26% dengan pendanaan sendiri (APBN/APBD) dan 41% jika dibantu pendanaan internasional hingga tahun 2020. Komitmen tersebut kemudian diregulasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Nasional (RAN-GRK). Pasca ratifikasi Kesepakatan Paris 2015, target direvisi menjadi 29% dan 41% pada 2030 dalam kerangka *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Dari keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut, yang terpenting adalah ketika pemerintah berhasil memasukkannya

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai piranti dalam menjalankan politik anggaran. Dengan demikian, aksi penurunan emisi menjadi bagian yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial, bukan lagi sebuah kebijakan yang terpisah-pisahkan. Kebijakan penurunan laju deforestasi, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA) dan lingkungan pun akan semakin diintensifkan.

Pasca bergulir secara nasional, PRK juga wajib diterjemahkan ke dalam proses perencanaan penganggaran di RPJMD masing-masing daerah. Mempertimbangkan penjelasan tersebut, PRK sekiranya menjadi kebutuhan perencanaan pembangunan yang sangat *urgent* jika dikaitkan dengan kondisi daerah yang banyak menghadapi persoalan lingkungan khususnya di era otonomi daerah. Masih ditemukannya fenomena kutukan SDA di beberapa daerah, mengindikasikan adanya kebutuhan tersebut. Dengan mendasarkan kepada PRK maka daerah menjadi lebih mudah dalam menyusun sektor prioritas baru menuju visi pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan inklusif.

Masalahnya adalah masih dijumpainya beberapa persoalan klasik dalam sistem pembangunan pemerintah. Masalah yang pertama adalah sering kali proses perencanaan tidak terkoneksi baik dengan rezim penganggaran. Sering dijumpai banyak hal yang direncanakan justru tidak terimplementasi karena tidak ada anggarannya atau justru sebaliknya tidak muncul di dokumen perencanaan namun tiba-tiba sudah ada alokasi anggarannya. Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* menjadi tantangan berikutnya. Bagaimana Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pemangku kepentingan sektoral wajib mendistribusikan kewenangan seluruhnya kepada daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, kecuali lima hal yang masih ada di kewenangan pemerintah pusat.

Penetapan proses penganggaran berbasis kinerja yang mencerminkan kesinambungan input-kegiatan/program-*output* dan *outcome* juga sering terkendala pencatuman satuan ukuran yang mengada-ada. Akibatnya pengukuran kinerja menjadi terhambat dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat sedang mencoba mengembangkan pendekatan penandaan anggaran (*budget tagging*) di daerah. Harapannya, dengan metode *tagging* tersebut secara perlahan beberapa permasalahan mendasar dapat diatasi dan daerah betul-betul mampu melakukan pengarusutamaan PRK ke dalam RPJMD secara tepat dan lugas. Semoga !!!!

Joko Tri Haryanto  
pegawai Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan RI



## Siklus

Ring – a – ring o’roses

A pocket full of posies

Ashes! Ashes!

We all fall down

**M**ERUPAKAN sebuah lirik lagu anak-anak di Inggris yang merujuk pada kejadian serangan penyakit pes. Wabah itu membunuh hampir seperempat penduduk Eropa antara 1346 hingga 1352. Saat muncul gejala cincin merah di tubuh, seketika mereka ingat apa arti hidup dan mati sebelum ajal menjemput. Dokter-dokter membawa *posies* untuk menangkal dan mengusir hawa penyakit. Namun akhirnya tetap sama “*all fall down*” – semuanya tumbang. Tak lama kemudian wabah itu dikenal dengan nama: maut hitam (*black death*). *John Clyn* seorang biarawan yang banyak menuliskan sejarah Irlandia menuliskan bahwa “Saat zaman pes desa dan kota kosong dari manusia, pes sangat menular sehingga siapa pun yang menyentuh orang sakit dan mayat langsung terkena dan mati”. Kemudian di era 1600-an, pes muncul kembali. Namun pada zaman pertengahan tersebut wabah terparah tidak hanya pes, melainkan wabah lain seperti cacar, disentri, dan terutama tifus. Memang masyarakat Eropa pada saat itu hidup dengan populasi amat padat, kumuh, dan sanitasi yang buruk. Menyebabkan mereka dekat sekali dengan para pinjal, tikus, dan binatang-binatang ternak. Pola perilaku yang menyebabkan wabah penyakit semakin mudah terjadi dan menular.

Setelah sekitar 1 abad dunia melawan serangan sampar, banyak korban jiwa yang terenggut. Menyebabkan di era 1700-an, populasi lebih langka dan tercipta keseimbangan baru. Masyarakat desa dapat menguasai tanah lebih luas, ketersediaan pangan juga sangat mencukupi. Masyarakat Eropa makin peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Dengan kondisi stabil itu lahirlah berbagai pemikiran baru dan temuan inovatif. Teknologi pemurnian besi dan batu bara diciptakan. Revolusi industri kemudian datang, diawali

dengan penemuan mesin bertenaga uap oleh James Watt. Lantas diikuti oleh pengembangan alat transportasi baru yang lebih cepat seperti mobil dan kereta api. Sejak saat itu populasi penduduk dunia meningkat hampir tiga kali lipat. Masyarakat Eropa juga hidup dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Dunia berkembang dengan cepat karena ditemukannya energi dan industri modern.

Setelah melewati perkembangan dari abad ke abad, sampailah di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Antar negara kembali berperang merebutkan hegemoni rantai pasokan ekonomi dunia. Problematika geopolitik meruncing di dua kutub antara Amerika Serikat - China. Sengitnya ekspansi ekonomi antar negara lantas kemudian mengorbankan ekologi. Alam pun mulai dibabat habis demi kebutuhan perluasan lahan produksi. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang mulai langka lalu kemudian punah. Suhu permukaan bumi naik. Pemanasan global menjadi isu dan musuh bersama antar negara. Lingkungan kembali berjejal padat. Peperangan dan kelaparan muncul dengan wajah dan bentuk yang baru. Ketidakstabilan tatanan dunia terjadi kembali. Dan tibalah akhirnya penyakit sampar datang. Desember 2019, Covid-19 hadir menjadi wabah pandemik yang menjangkit lebih dari 1,5 juta orang dan menewaskan 80.000-an orang di seluruh dunia. Jumlah tersebut terus meningkat hingga kini. Ekspansi ekonomi yang sedang tumbuh terhempas seketika, *shut down*. Krisis menghantui, karena entah sampai kapan wabah ini bisa tertangani.

Namun seperti siklus yang terus berulang. Sejarah mencatat, tatanan dunia akan terus menciptakan keseimbangannya sendiri, entah itu dari bencana, peperangan, atau penyakit. Kalau dulu setelah wabah PES, muncul berbagai temuan inovatif dan revolusi industri. Kita belum tahu, apa pesan yang dibawa sampar pada kunjungannya kali ini. Mari kita kembali “*eling*” dan terang pikir. Untuk kepentingan ekonomi selama ini, bumi telah membayar dengan harga yang teramat mahal. Biarkanlah wabah ini memberikan waktu untuk dunia memulihkan diri dari segala konflik, polusi, dan eksploitasi. Selain elegi, sampar selalu membawa misteri.

■ AJI NUR CAHYO



wallpaperflare.com



BPP  
KEMENDAGRI

# Call for Papers

## MATRA PEMBARUAN

(Nomor Akreditasi: 14/E/KPT/2019 (SINTA 3))



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2020, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu **Mei dan November**.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Registrasi dan submit artikel anda di  
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat  
0858 1325 8250/Rifky (Whatsapp Only)  
matrapembaruan@gmail.com

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA  
GARBA RUJUKAN DIGITAL

Crossref

# Call for Papers



**JURNAL BINA PRAJA / MAY & NOV**

THEME  
“**HOME AFFAIRS GOVERNANCE**”

ACCREDITED NUMBER  
21/E/KPT/2018 (SINTA 2)

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy  
Politics and Public Administration  
Territorial Administration  
and Rural Governance  
Population and Civil Registration  
Regional Election and Regional Innovation  
Regional Fiscal Policy and Development  
Other Issues in Public Administration



## TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index> | A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

## INDEXED BY:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat  
08812-1941-9885 | redaksijbp@gmail.com